

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA**

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANGGA AULIA RAHMANDA

145020107111018

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

THE INFLUENCE OF FISCAL DECENTRALIZATION ON LOCAL ECONOMIC GROWTH IN REGENCIES AND CITIES IN PAPUA PROVINCE

MINOR THESIS

By:

ANGGA AULIA RAHMANDA

145020107111018

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Attainment of the Degree of Bachelor of Economics**



**DEPARTEMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

" Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua "

Yang disusun oleh :

Nama : Angga Aulia Rahmanda
NIM : 145020107111018
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **9 Mei 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Al Muizzudin Fazaalloh, SE., ME.
NIP. 198604032015041002
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc.
NIP. 196410291989031001
(Dosen Penguji I)
3. Moh. Athoillah, SE., ME.
NIP. 2016058411211001
(Dosen Penguji II)

Matang, 17 Mei 2018
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di
Kabupaten/Kota Provinsi Papua**

Yang disusun oleh :

Nama : Angga Aulia Rahmanda
NIM : 145020107111018
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Drs. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D
NIP. 195503111989032001

Malang, 11 April 2018
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Al Muizzudin Fazaalloh, SE., ME
NIP. 198604032015041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Angga Aulia Rahmanda**
Tempat, tanggal lahir : **Banyuwangi, 2 Agustus 1996**
NIM : **145020107111018**
Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**
Konsentrasi : **Kuangan Negara dan Daerah**
Alamat : **Jalan Senggani 32 Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Al Muizzudin Fazaalloh, SE., ME.
NIP. 198604032015041002

Malang, 11 April 2018

Yang membuat pernyataan,



Angga Aulia Rahmanda
NIM. 145020107111018



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Angga Aulia Rahmanda
NIM : 145020107111018
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 2 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat di Malang : Jalan Senggani 32 Malang
Nomor Telepon : +6282231251150
Email : Anggaauliarahmanda11@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Aisyiyah Bustanul Atfal Rogojampi (2000 – 2002)
SD Negeri 1 Rogojampi (2002 – 2008)
SMP Negeri 1 Rogojampi (2008 – 2011)
SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi (2011 – 2014)
Universitas Brawijaya Malang (2014 – 2018)

Pengalaman Organisasi

Staf Divisi Pelatihan dan Pengembangan Personal HMJIE Periode 2016

Pengalaman Kepanitiaan

Staf Divisi Transkoper “Communication Training” Tahun 2015

Staf Divisi Perlengkapan “ECOLYMPICS” Tahun 2015

Staf Divisi Transkoper “E-JOURNEY” Tahun 2015

Staf Divisi Marketing “ECOFEST” Tahun 2016

Asisten Koordinator Divisi Transkoper “IE SOLID” Tahun 2016

Asisten Koordinator Divisi Acara “PEMILWA IE” Tahun 2016

Pengalaman Kerja

Magang di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia (4 September 2017 – 9 Oktober 2017)



PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA

Angga Aulia Rahmanda

Email: Anggaauliarahmanda11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator penerimaan, indikator pengeluaran, dan indikator otonomi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Metode analisis yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif serta analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan menghasilkan model yang terbaik yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) melalui alat analisis Eviews versi 10. Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator penerimaan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan untuk desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator pengeluaran dan indikator otonomi memiliki hasil yang sama yakni tidak memiliki pengaruh secara signifikan ke pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi Daerah

THE INFLUENCE OF FISCAL DECENTRALIZATION ON LOCAL ECONOMIC GROWTH IN REGIENCES AND CITIES IN PAPUA PROVINCE

Angga Aulia Rahmanda

Email: Anggaauliarahmanda11@gmail.com

ABSTRAC

This study aims to determine the influence of fiscal decentralization as measured by revenue indicators, expenditure indicators, and autonomy indicators on local economic growth. The analytical method used is quantitative approach and data analysis used is panel data regression by producing the best model that is Fixed Effect Model (FEM) through Eviews version 10. The research result shows fiscal decentralization as measured by revenue indicator has significant and negative effect to regional economic growth. As for fiscal decentralization as measured by expenditure indicators and indicators of autonomy have the same result that does not have a significant effect to the economic growth of the region in the Regencies and Cities of Papua Province.

Keywords: Fiscal Decentralization, Local Economic Growth

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua**. Penyusunan skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis selama hidup di dunia ini.
2. Bapak Hamzah H. Gani dan Ibu Tri Rinariani sebagai Orang tua tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan, motivasi, kasih sayang, dan doa bagi penulis. Dyas Wahyu Merdyansyah serta Achmad Julianto selaku Kakak penulis yang selalu memberikan semangat agar cepat lulus kuliah. Dan terakhir Anggi Aulia Rahma (Kembaran) dan Defariani Wahyu Rianzah selaku Adik penulis yang terus memberikan dukungan serta doa agar terselesaikan skripsi ini.
3. Bapak Al Muizzudin Fazaalloh SE., ME. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mengarahkan, sabar, dan bijaksana dalam memberikan bimbingan, banyak memberikan kritik yang membangun, saran, memberi semangat, dan nasehat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc. dan Bapak Moh. Athoillah, SE., ME. Sebagai dosen penguji yang telah memberikan banyak perbaikan untuk skripsi ini.
5. Bapak Drs. Nurkholis, SE., M.Buss(Acc)., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE. ME. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
7. Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bimbingan kepada penulis, serta Karyawan/Karyawati Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu dalam administrasi akademi penulis.
9. Teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi terutama Program Studi Ekonomi Pembangunan 2014 yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Konsentrasi Keuangan Negara dan Daerah (KNKD) yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga telah terlibat, berperan serta membantu dalam menyusun skripsi sampai selesai.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik membangun dari pembaca agar dapat dilakukan perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Aamiin.

Malang, 17 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik	12
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik	13
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru	14
2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow	14
2.2 Desentralisasi Fiskal	16
2.3 Transfer ke Daerah	18
2.4 Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi	22
2.5 Penelitian Terdahulu	25
2.6 Kerangka Pemikiran	31
2.7 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34

3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel Penelitian	35
3.4 Penentuan Model	37
3.5 Data dan Sumber Data	38
3.6 Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Lingkup Penelitian	45
4.2 Deskripsi Variabel	46
4.2.1 Deskripsi Desentralisasi Fiskal	46
4.2.2 Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah	55
4.2.3 Deskripsi Pertumbuhan Penduduk	57
4.2.4 Deskripsi Investasi Daerah	58
4.3 Pemilihan Model Regresi	59
4.3.1 Pengujian Pertama	60
4.3.2 Pengujian Kedua	62
4.3.3 Pengujian Ketiga	63
4.4 Hasil Estimasi	64
4.4.1 Pengujian Pertama	64
4.4.2 Pengujian Kedua	66
4.4.3 Pengujian Ketiga	68
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	70
4.5.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	70
4.5.2 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	96
4.6 Implikasi Penelitian	97
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016	4
Tabel 1.2	Alokasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota dan Provinsi di Papua Tahun 2011-2016	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1	Indikator Penerimaan Kabupaten/Kota Provinsi Papua	49
Tabel 4.2	Indikator Pengeluaran Kabupaten/Kota Provinsi Papua	51
Tabel 4.3	Indikator Otonomi Kabupaten/Kota Provinsi Papua	54
Tabel 4.4	Hasil Uji Chow Pengujian Pertama	61
Tabel 4.5	Hasil Uji Hausman Pengujian Pertama	61
Tabel 4.6	Hasil Uji Chow Pengujian Kedua	62
Tabel 4.7	Hasil Uji Hausman Pengujian Kedua	62
Tabel 4.8	Hasil Uji Chow Pengujian Ketiga	63
Tabel 4.9	Hasil Uji Hausman Pengujian Ketiga	63
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Pertama Fixed Effect Model (FEM)	64
Tabel 4.11	Hasil Pengujian Kedua Fixed Effect Model (FEM)	66
Tabel 4.12	Hasil Pengujian Ketiga Fixed Effect Model (FEM)	68
Tabel 4.13	Nilai Koefisien Pengujian Pertama Pada Kabupaten/Kota	78
Tabel 4.14	Nilai Koefisien Pengujian Kedua Pada Kabupaten/Kota	88
Tabel 4.15	Nilai Koefisien Pengujian Ketiga Pada Kabupaten/Kota	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendapatan Negara dalam APBN Tahun 2011-2016	2
Gambar 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Dengan dan Tanpa Pertambangan dan Penggalan Tahun 2011-2016	7
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1	Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua .	47
Gambar 4.2	Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua	50
Gambar 4.3	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua ...	53
Gambar 4.4	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Papua	56
Gambar 4.5	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Papua ..	57
Gambar 4.6	Rasio PMTB terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Papua	59
Gambar 4.7	Realisasi Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota Provinsi Papua	72
Gambar 4.8	Rata-rata Perbandingan antara Dana Perimbangan Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016	74
Gambar 4.9	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2012-2015	77
Gambar 4.10	Rata-rata Perbandingan Kontribusi Belanja Operasi, Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016	83
Gambar 4.11	Rata-rata Perbandingan antara Belanja Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016	84
Gambar 4.12	Rata-rata Perbandingan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016	90
Gambar 4.13	Rata-rata Perbandingan antara PAD Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016	92

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Hasil Uji Chow Pengujian Pertama
- Lampiran 2: Hasil Uji Hausman Pengujian Pertama
- Lampiran 3: Hasil Model Fixed Effect Pengujian Pertama
- Lampiran 4: Hasil Uji Chow Pengujian Kedua
- Lampiran 5: Hasil Uji Hausman Pengujian Kedua
- Lampiran 6: Hasil Model Fixed Effect Pengujian Kedua
- Lampiran 7: Hasil Uji Chow Pengujian Ketiga
- Lampiran 8: Hasil Uji Hausman Pengujian Ketiga
- Lampiran 9: Hasil Model Fixed Effect Pengujian Ketiga
- Lampiran 10: Data Variabel Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

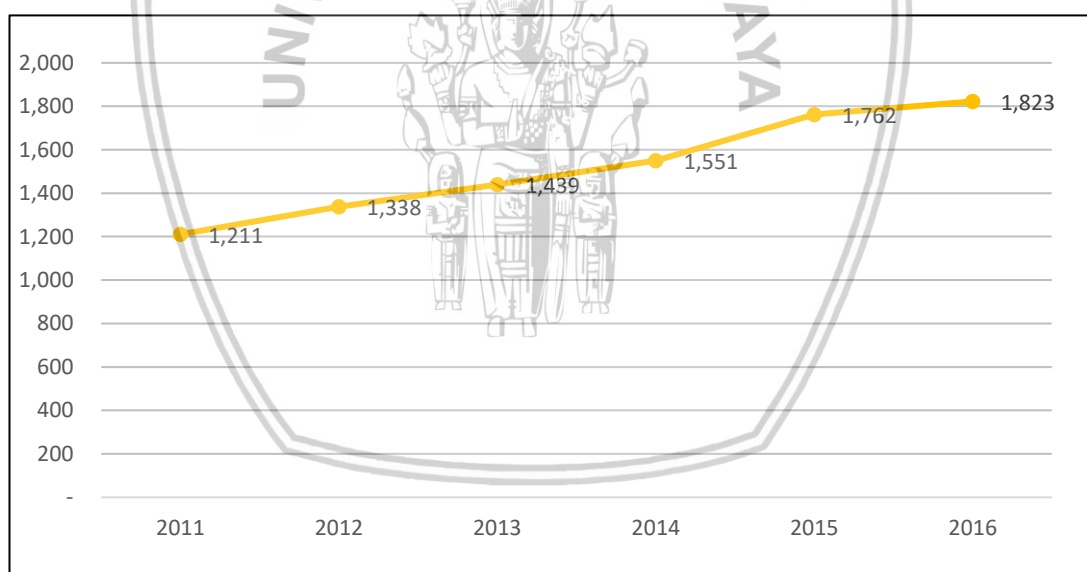
1.1 Latar Belakang

Perubahan bentuk kewenangan pemerintahan memberikan dampak yang berarti untuk setiap daerah di cakupan sebuah negara. Awalnya berbentuk sentralisasi tanpa membuahkan hasil sekaligus pemerataan antar daerah dalam konteks kesejahteraan masyarakat sehingga diubahlah permulaan itu dengan sesuatu hal yang baru. Pelimpahan kewenangan, hak, dan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian semacam itulah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah dengan adanya desentralisasi ini.

Otonomi daerah merupakan pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi yang mengedepankan prinsip otonomi daerah ini, maka menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Menurut, Widiyanto (2015), salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Jadi, munculnya otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri beserta mengelola keuangan dengan lebih mandiri. Oleh karena itu, masing-masing daerah otonom diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menjadi bukti pemberlakuan otonomi daerah di berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan pemberian sejumlah dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan tujuan menghilangkan kesenjangan daerah. Sumber keuangan yang menjadi penopang setiap daerah dalam menjalankan pemerintahannya selaku daerah otonom adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian (PMK Nomor 06/PMK.07/2012).

Gambar 1.1: **Pendapatan Negara dalam APBN Tahun 2011-2016 (dalam Triliun Rupiah)**



Sumber: Data diolah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018

Grafik diatas menjelaskan bahwa Penerimaan negara yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat memiliki tren meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sebesar Rp 1.210,6 Triliun sampai mencapai Rp 1.822,5 Triliun pada tahun 2016. oleh karena itu besar kemungkinan yakni dana yang ditransfer ke daerah akan mengalami peningkatan pula. Peningkatan yang cukup signifikan

pada transfer dana ke daerah telah menyebabkan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintahan secara umum telah berkurang. Sebaliknya proporsi pengelolaan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah sepenuhnya melalui APBD akan meningkat tajam (Ismail et al, 2014).

Peningkatan jumlah dana yang didaerahkan tampak begitu signifikan terutama pada daerah-daerah dengan sumber daya alam melimpah namun selama ini tergolong daerah tertinggal. Salah satu daerah yang mengalami peningkatan penerimaan daerah sangat signifikan setelah desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia adalah Provinsi Papua. Hasil penelitian Bank Dunia (2005) menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah Papua meningkat dua kali lipat setelah pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mulai diterapkan di Papua pada tahun 2001. Pendapatan pemerintah meningkat lebih tinggi lagi setelah pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Pada tahun 2003, Papua dilaporkan menjadi daerah kedua yang memiliki belanja pembangunan per kapita tertinggi di antara seluruh daerah yang ada di Indonesia (Mualim, 2010).

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan memiliki tren yang selalu meningkat setiap tahunnya karena menyesuaikan dengan penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN yang juga selalu meningkat.

Tabel 1.1: **Realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016**

Tahun	Dana Perimbangan (dalam jutaan rupiah)	Pertumbuhan (%)
2011	15.981.094	-
2012	19.106.601	19,5
2013	20.067.119	5
2014	22.803.045	13,6
2015	28.653.687	25,6
2016	32.263.736	12,6

Sumber: Data diolah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Ketajaman peningkatan dana perimbangan berkat desentralisasi fiskal di Provinsi Papua terus menerus terjadi sampai periode sekarang ini. Tak dipungkiri lagi faktanya bahwa seluruh wilayah Papua mendapatkan porsi dengan skala yang lebih besar tiap tahunnya. Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah apakah dengan semakin besarnya dana yang didaerahkan ke wilayah Papua seiring dengan desentralisasi fiskal akan seiring juga meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator utama percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat?

Diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan jawaban atas kekhawatiran diatas. Pada transfer dana ke daerah terdapat kekhususan untuk Provinsi Papua dalam perolehan besarannya yang berdasarkan mandat Undang-Undang diatas, dana perimbangan menjadi meningkat dari nominal sebelumnya diantaranya dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang ditetapkan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua serta dana bagi hasil yang juga porsinya lebih tinggi pula. Selain itu terdapat tambahan dana lagi terkhusus Provinsi Papua yang tidak

didapatkan oleh daerah lain yaitu dana dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.

Dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Asli Papua. Dana otonomi khusus ini terbagi menjadi dua yaitu pos penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang terutama ditujukan untuk pembiayaan Pendidikan dan kesehatan serta pos dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dengan ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur.

Bahkan selama bergulirnya pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua telah banyak pergantian periodisasi persentase pengalokasian dalam pembagian dana otonomi khusus. Sebelumnya perbandingan 60% (enam puluh persen) untuk Provinsi sedangkan Kabupaten/Kota mendapatkan 40% (empat puluh persen). Pada tahun 2014, ada hal yang menarik dengan diberlakukan kebijakan yang dijuluki "*Enembe-nomics*" yakni mendesentralisasi fiskal-kan anggaran dana otonomi khusus dengan formula 80% (delapan puluh persen) ke Kabupaten/Kota se Papua dan untuk Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen). Hal ini tentu dijadikan sebagai terobosan mempercepat pembangunan daerah di semua wilayah Papua.

Tabel 1.2: **Alokasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota dan Provinsi di Papua Tahun 2011-2016**

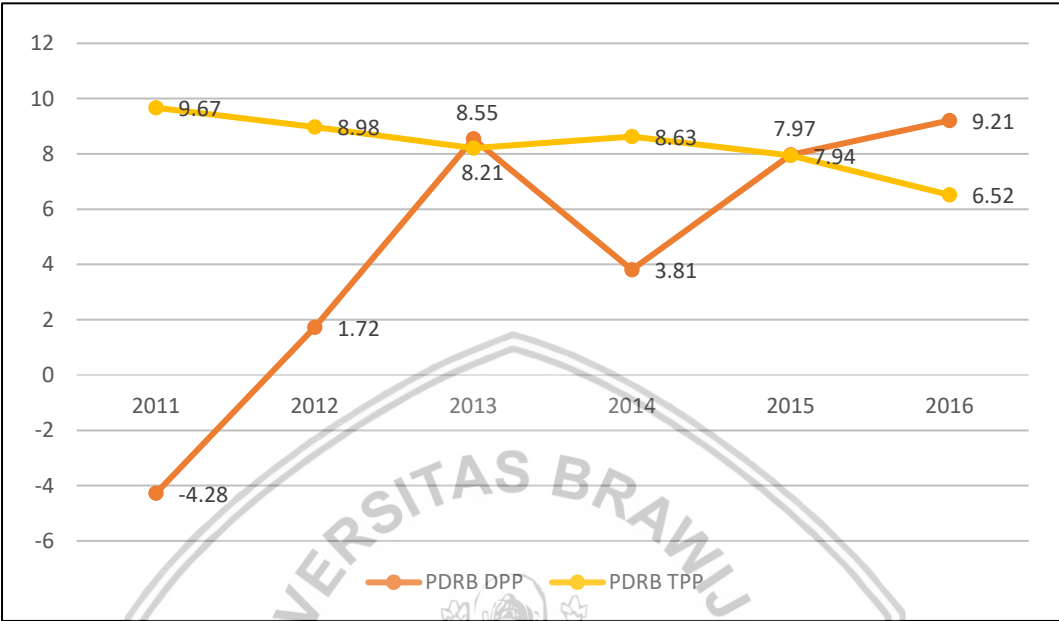
Tahun	Dana Otonomi Khusus	Pertumbuhan (%)
2011	3.957.459.547.550	-
2012	4.404.830.706.000	11,3
2013	4.927.378.620.000	11,8
2014	6.777.070.975.000	37,5
2015	7.190.429.880.000	6,1
2016	5.595.051.859.400	-22,1

Sumber: Data diolah BPKAD Provinsi Papua, 2018

Tuntutan atas kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah di Papua yang disertai dengan dana otonomi khusus Papua diharapkan akan dapat solusi terbaik. Sayangnya setelah sekian lama implementasi desentralisasi Papua ternyata belum memberikan pengaruh yang signifikan. Besarnya dana yang dialokasikan ke Papua dengan jumlah penduduk yang sedikit belum bisa mendorong perekonomian di tanah Papua tumbuh dengan cepat sebagaimana cepatnya pertumbuhan alokasi dana yang didaerahkan.

Untuk menggambarkan perekonomian di Papua yang lebih riil, sektor pertambangan dan penggalan dieliminir, karena sebagian besar nilai tambah dari sektor tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat Papua. Oleh karena itu, penelitian ini memaparkan pula pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan dan penggalan. Laju Pertumbuhan ekonomi di Papua tanpa tambang tahun 2011-2016 cukup stabil. Akan tetapi memiliki tren yang semakin menurun selama kurun waktu tersebut, meskipun ada kenaikan sedikit pada tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,26% sekalipun. Jika dibandingkan pertumbuhan ekonominya dilihat dengan kedua sektor tersebut angka pertumbuhannya tidak stabil dan kurang mencerminkan perekonomian di Papua yang sesungguhnya.

Gambar 1.2: **Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Dengan dan Tanpa Pertambangan dan Penggalian Tahun 2011-2016 (dalam persen)**



Sumber: Data diolah BPS Provinsi Papua, 2018

Berbagai penelitian tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti yang berminat di bidang tersebut baik penelitian nasional maupun internasional. Salah satunya oleh Akai dan Sakata (2002) yang meneliti tentang desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di 50 negara bagian di Amerika Serikat dengan menggunakan pengukuran desentralisasi fiskal berupa *Revenue Indicator* (RI), *Production Indicator* (PI), *Autonomy Indicator* (AI), dan *Production-revenue Indicator* (PRI) serta menggunakan variabel kontrol untuk variabel independennya. Hal yang serupa direplika oleh peneliti lokal Rustan (2013) tentang desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah di 19 Provinsi di Indonesia dengan menggunakan variabel kontrol dan pengukuran yang sama pada variabel desentralisasi fiskal berdasarkan penelitian Akai dan Sakata.

Penelitian lain dilakukan oleh Rodriguez-Pose dan Kroijer (2009), Nguyen dan Anwar (2011) dan Yuskhov (2015) yang semuanya meneliti tentang desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di daerah penelitiannya masing-masing. Ketiga penelitian tersebut menggunakan variabel kontrol dan menggunakan pengukuran variabel desentralisasi fiskal yang berbeda-beda pula. Adapun lagi penelitian nasional oleh Kusuma (2013) yang meneliti tentang desentralisasi fiskal pula di Indonesia dengan menggunakan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa dan Sulawesi untuk lokasi penelitiannya.

Berbagai penelitian-penelitian diatas mengungkapkan bahwa telah banyak dilakukan penelitian mengenai desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi dengan segelintir penelitian masih minim sekali penelitian di Indonesia dengan menggunakan pengukuran untuk menjelaskan desentralisasi fiskal yang berdasarkan penelitian internasional dan berfokus pada wilayah Kabupaten/Kota teruntuk di Provinsi Papua yang memang mempunyai keistimewaan tersendiri dalam mendapatkan transfer ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Hal itulah yang menjadi gap riset dalam penelitian ini sedangkan gap teorinya ialah dengan dana yang berlimpah yang telah disalurkan ke Papua serasa belum terpenuhi harapan dari Pemerintah Pusat dengan serasinya jalan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan menggambarkan kondisi perekonomian di berbagai daerah Papua khususnya. Keadaan ini menjadi alasan kuat untuk melaksanakan penelitian ini, maka penelitian dilaksanakan dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua”.

1.2 Rumusan Masalah

Berjalannya sistem desentralisasi di Indonesia khususnya Papua pertanda bahwa Pemerintah daerah menerima dana transfer dari Pemerintah untuk

mengurus serta mandiri dalam mengelola pemerintahannya sendiri sesuai Undang-Undang yang telah diterbitkan. Seiring dengan penerapannya, dirasa Provinsi Papua masih tergolong daerah yang kondisinya tertinggal oleh karena itu diberikan dana perimbangan yang lebih besar daripada daerah lain serta tambahan dana otonomi khusus yang daerah lain tidak memilikinya. Dengan berlimpah dana yang didaerahkan ternyata belum berimbas ke pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat Papua. Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pertanyaan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan ilmu ekonomi maupun bagi pengambil kebijakan. Manfaat penelitian tersebut antara lain :

1. Secara Teoritis dan Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan teori-teori yang sudah ada salah satunya teori *Fiscal Federalism* terhadap fenomena desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua yang kaitannya ke pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping itu, diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi dan tambahan data bagi setiap pembaca, pengamat ekonomi serta bagi peneliti-peneliti lain selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan informasi bagi pemerintah kabupaten/kota Provinsi Papua dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menunjukkan perkembangan suatu perekonomian pada tahun ini dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi pada tahun sekarang lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya dan begitu juga sebaliknya. Perkembangan suatu perekonomian selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional, atau sering juga disebut Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

Suatu daerah yang memiliki tingkat sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berbeda, tentu tingkat pertumbuhan ekonomi yang dimiliki juga akan berbeda. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bukti keberhasilan dari pemerintah daerah dalam pengalokasian sumberdaya yang ada. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satu tahun dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$g_t = \frac{Y^r_t - Y^r_{t-1}}{Y^r_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

g_t = tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t

Y^r_t = pendapatan nasional (PDRB) riil pada tahun t

Y^r_{t-1} = pendapatan nasional (PDRB) riil pada tahun sebelumnya

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi pada skala regional dalam periode tertentu salah satunya melalui produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu PDRB atas dasar harga konstan (riil) dan PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan berdasarkan harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Berikut adalah teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi yang akan memperjelas teori dalam penelitian:

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori Ekonomi Klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Teori ekonomi klasik mulai berkembang sekitar pada abad ke-18. Adam Smith ialah pemikir utama dari ekonomi klasik. Sebuah karya pertama miliknya pada tahun 1776 pertanda dimulainya era ekonomi klasik yaitu *The Wealth of Nations*.

Ekonomi Klasik menjelaskan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Menurut Smith terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1999). Sukirno (2000) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor

produksi. Faktor produksi dianggap faktor yang penting karena sebelum mencapai peningkatan laju pertumbuhan ekonomi didahului oleh peningkatan faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa mengalami peningkatan maupun penurunan tanpa adanya perubahan pada faktor produksi. Unsur pokok faktor produksi suatu negara ada tiga yang meliputi:

- 1) Ketersediaan sumberdaya alam, ketersediaan sumberdaya alam ini merupakan input mendasar dalam melakukan kegiatan produksi masyarakat yang jumlahnya memiliki batas maksimum bagi pertumbuhan
- 2) Ketersediaan sumberdaya insani, maksudnya yaitu jumlah penduduk sebagai modal kebutuhan akan tenaga kerja dalam proses peningkatan output
- 3) Stok modal yakni sebagai salah satu input produksi yang menentukan seberapa besar tingkat pertumbuhan outputnya

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Model pertumbuhan ekonomi neo-klasik atau yang biasa disebut sebagai model pertumbuhan Solow dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk tetapi dalam model ini juga menitik pusatkan pada kemajuan teknologi. Tiga input utama dalam model Solow tersebut secara umum berbentuk fungsi produksi. Interaksi antara ketiga input produksi yang meliputi akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi akan menghasilkan output yang lebih tinggi dibandingkan sebelum memasukkan input kemajuan teknologi. Pada model pertumbuhan neo-klasik Solow memperlihatkan faktor produksi yang meliputi pertumbuhan persediaan modal, angkatan kerja, serta kemajuan teknologi yang saling berinteraksi dalam suatu perekonomian, selain itu melihat bagaimana pengaruh

yang diberikan terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003).

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru

Teori pertumbuhan ekonomi baru (*New Growth Theory*) dipelopori oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas tahun 1988 sebagai bentuk kritikan terhadap teori pertumbuhan neo-klasik Solow. Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Selain itu, dianggap bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada system produksi, bukan berasal dari luar sistem.

Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994 dalam Satria, 2016). Selain teori Solow, teori ini sepakat bahwa Sumberdaya manusia merupakan kunci utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rostow lebih banyak ditekankan peranan beberapa factor tertentu yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan menganalisa tentang ciri-ciri perubahan yang tercipta dalam tiap-tiap pembangunan suatu masyarakat. Rostow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari berbagai perubahan yaitu:

- a. Perubahan reorientasi organisasi ekonomi
- b. Perubahan pandangan masyarakat

- c. Perubahan cara menabung atau menanamkan modal dari yang tidak produktif ke yang lebih produktif
- d. Perubahan pandangan terhadap faktor alam. Manusia harus mengubah keyakinan bahwa alam itu tidak menentukan kehidupan manusia, tapi kehidupan manusia harus mampu menaklukkan/mengendalikan kekayaan alam sehingga apa yang tersedia dapat menjadi sumber dalam mencapai kemakmuran

Menurut Rostow dalam Sadono (2006), pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat digolongkan menjadi lima yaitu:

- a. *The traditional society* (masyarakat tradisional)
- b. *The precondition for take off* (pra masyarakat untuk lepas landas)
- c. *The take off* (lepas landas)
- d. *The drive to maturity* (gerakan kearah kedewasaan)
- e. *The age of high mass consumption* (masa konsumsi tinggi)

Menurut Adisasmita (2008) menjelaskan bahwa analisis Rostow berdasarkan pada analisis ekonomi dan analisis non ekonomi menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara sendiri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

- a. Sumber daya manusia: tenaga kerja, penduduk, disiplin, motivasi, dan lainnya
- b. Sumber daya alam: tanah, iklim, mineral, bahan bakar, dan lainnya
- c. Pembentukan modal: mesin-mesin, jalan raya, pabrik, jalan raya, dan lainnya
- d. Tingkat teknologi: pengetahuan, rekayasa, manajemen, kewirausahaan, dan lainnya

2.2 Desentralisasi Fiskal

Dalam beberapa tahun belakangan setelah melewati arus kepemimpinan Presiden Kedua Indonesia, menandakan bahwa era reformasi telah berlalu dengan rasa pahit sistem sentralisasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang memiliki dampak terpuruknya perekonomian khususnya di wilayah luar pemerintahan pusat. Otonomi daerah menjadi isu paling penting setelah era orde baru dimulai dan paling mengemuka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam keadaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Merujuk pada konsep desentralisasi, Noor (2012) dalam bukunya yang berjudul "Memahami Desentralisasi Indonesia" menjelaskan bahwa dengan wilayah yang sangat luas seperti Indonesia, dengan beragam corak dan budaya beraneka rupa dan dengan bermacam-macam kebutuhan dan potensi setiap daerah, tentu saja sistem sentralistik akan menjadi sesuatu yang mustahil dalam menciptakan pemerataan kemakmuran dan keadilan serta pemberdayaan yang merata bagi semua warga negara. Sejak era reformasi bergulir, proyek desentralisasi yang diwujudkan dalam proyek otonomi daerah menjadi sesuatu yang signifikan buah hasilnya bagi perkembangan tiap pemerintah daerah yakni dalam pengelolaan keuangan beserta menggali potensi dan sumberdaya mereka dengan semaksimal mungkin demi kepentingan daerah sekaligus kemakmuran masyarakat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, sistem desentralisasi memegang peranan penting dalam merubah pemerintahan suatu daerah menjadi lebih baik.

Desentralisasi dalam pandangan Adam dan Eltayeb (2016) dapat diartikan sebagai pengakuan dan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke badan-badan umum yang lebih rendah dengan dijadikan sebagai aktor tersendiri

dalam mengelola secara mandiri dan mempertimbangkan kepentingan mengambil keputusan pengaturan dalam pemerintahan yang terstruktur

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal erat kaitannya dengan pelayanan publik, mengingat fungsinya sebagai suatu alat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sehingga istilah desentralisasi hanya sebatas pemberian kewenangan secara penuh bagi Pemerintah daerah sedangkan desentralisasi fiskal lebih menjurus kepada pemberian bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Akan tetapi, kedua istilah tersebut masih mencakup arti yang sama.

Dalam penerapan desentralisasi ini, pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan sumber keuangan kepada pemerintah daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, mengatakan bahwa pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Oleh karena itu, Pemberian keuangan dari pemerintah pusat diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pos pendapatan guna membantu sumber keuangan Pemerintah daerah yang dirasa belum mampu mengemban pemerintahan sendiri dalam mendapatkan penerimaan yang cukup besar untuk mendanai kebutuhan masyarakat daerahnya. Transfer ke Daerah

adalah bagian belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian (PMK Nomor 06/PMK.07/2012).

Konsep desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi. Berdasarkan Kalin (2001), menyebutkan. bahwa desentralisasi dibagi dalam empat bentuk antara lain:

- 1) Desentralisasi politik bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya masyarakat local dalam proses pengambilan keputusan secara politis
- 2) Desentralisasi administratif yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan public
- 3) Desentralisasi ekonomi merujuk pada transfer fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Artinya penguasaan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah disertakan kepada perusahaan swasta, kepentingan kelompok, organisasi dan bukan pemerintah lainnya.
- 4) Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi, apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak.

2.3 Transfer ke Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan dana perimbangan

adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follow function*. Prinsip tersebut berarti setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dengan Pemerintahan daerah dan antar Pemerintah daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah masing-masing serta sektor unggulan setiap daerah yang berbeda-beda. Menurut Ma (1997) dalam Tsalits (2017), mengatakan bahwa terdapat tiga alasan untuk melakukan transfer antar pemerintah dilihat dari sudut pandang ekonomi yaitu:

- a. Terdapat ketidaksinambungan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*) yang terjadi karena pemerintah pusat menguasai pajak-pajak utama, sehingga sumber pajak yang dikuasai daerah tidak memadai untuk mendanai berbagai pengeluaran
- b. Adanya ketidakseimbangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*) yaitu perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antar daerah
- c. Adanya efek pelimpahan antar daerah (*spill-over effect*) yaitu eksternalitas ekonomis dan eksternalitas disekonomis dari suatu kegiatan di suatu daerah kepada daerah lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 dalam Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil dari

penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam menggencarkan sistem desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Berikut adalah penjelasan tiga komponen dari dana perimbangan antara lain:

- 1) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi penghasil.
- 2) Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dan sumber daya alam.
- 3) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan yang dilakukan oleh

Pemerintah Pusat sampai sekarang ini diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada transfer dana ke daerah terdapat kekhususan untuk Provinsi Papua dalam perolehan besarannya yang berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang berarti Provinsi Papua mendapatkan perlakuan istimewa diantaranya:

- a) Dalam hal Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas, yaitu 70% (tujuh puluh persen), sementara untuk Sumber Daya Alam Lain, keduanya menerima persentase sama seperti provinsi lain. Untuk Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keduanya menerima 90% (sembilan puluh persen), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen), dan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi sebesar 20% (dua puluh persen). Namun setelah masa berlaku selama 25 tahun khusus untuk ketentuan istimewa Bagi Hasil Minyak dan Gas akan berubah menjadi 50% (lima puluh persen)
- b) Dana Alokasi Umum sebagai *block grant* dari Pemerintah Pusat untuk menutup celah kemampuan fiskal antar wilayah. Hasil analisis yang dilakukan World Bank (2005), Dana Alokasi Umum yang didapatkan Papua sendiri sangat besar, nilainya dapat mencapai sekitar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan nasional. Maka tidak usah heran jika dibandingkan dengan kawasan lain, Papua saat itu menerima lima kali yang diterima Provinsi Jawa Timur dan empat kali yang diterima Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta dana alokasi khusus terlampaui diprioritaskan.
- c) Pos penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus (dana otonomi khusus) yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon

dana alokasi umum nasional selama 25 tahun, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta

- d) Pos dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur

2.4 Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas negara kepada daerah otonom. Sampai pada saat ini dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi topik perdebatan dalam berbagai literatur pembangunan. Hal ini juga diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah serta desentralisasi fiskal dapat berdampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, seperti meningkatnya konsumsi, penyerapan tenaga kerja dan hal baik lainnya.

Menurut Pose et all dalam Siagan (2016), terdapat banyak literatur yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan dan keuntungan ekonomi. Hidayat (2016), menyatakan bahwa pemberlakuan desentralisasi di Indonesia merupakan salah satu pemindahan sumber keuangan yang terbesar kepada pemerintah daerah, hal ini adalah hal penting untuk memastikan bahwa anggaran ini dikelola secara efektif sehingga berkontribusi pada peningkatan pembangunan.

Teori *Fiscal Federalism* merupakan teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945), Musgrave (1959) dan Oates (1972) dalam Tsalits (2017). Teori ini menekankan pertumbuhan ekonomi dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur rumah

tangga pemerintahan daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah. Teori *fiscal federalism* terbagi atas dua perspektif teori yakni menurut *traditional theories (first generation theory)* dan *new perspective theories (second generation theories)*.

1. *Traditional theories (first generation theory)* dikemukakan oleh Hayek (1945) yang menekankan keuntungan alokatif dari desentralisasi. Dari pandangan ini terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi. Pertama, tentang penggunaan *knowledge in society* mengenai proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Kedua, memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik yang sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat.
2. Sementara *new perspective theories (second generation theories)*, dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) lebih menekankan pada bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi

Menurut Thiessen (2003) terdapat empat hal yang menjadi argumen dasar akan manfaat diterapkannya desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu:

- 1) Berlakunya *diversification hypothesis*, dalam argumen ini menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa publik secara seragam itu menjadikan tidak efisien. Hal ini dikarenakan perbedaan waktu terhadap permintaan

barang dan jasa publik lokal di setiap daerah. Peran desentralisasi disini yaitu sumberdaya yang ada dapat disimpan dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah pada kurun waktu yang tepat

- 2) *Leviathan restraint hypothesis*, yaitu pemerintah cenderung berorientasi tingkat pendapatan yang tinggi sehingga berpotensi merugikan para pembayar pajak. Adanya persaingan horizontal maupun vertikal dalam pemerintahan yang berbeda dapat mencegah terjadinya maksimasi pendapatan. Kebijakan desentralisasi fiskal disini dapat membatasi anggaran atas pengeluaran keseluruhan sektor publik, mencegah terjadinya inefisiensi sektor publik
- 3) *Productivity enchancement hypothesis*, yaitu desentralisasi fiskal yang berupa pengalihan tanggungjawab dari pemerintah pusat terhadap daerah dapat memproduksi maupun dalam penyediaan barang publik. Di samping itu, timbulnya persaingan antar daerah dapat mendorong terjadinya efisiensi produksi. Dengan demikian desentralisasi fiskal dapat menciptakan efisiensi produksi atau *producer efficiency* yang lebih besar
- 4) Argumen politik, di mana desentralisasi akan mengurangi terjadinya konsentrasi kekuasaan politik, melemahkan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan (*vested interest*) atas kebijakan publik, mendorong demokrasi, pembangunan, dan dalam jangka panjang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, dilakukan untuk mempertajam analisis dan sebagai bahan perbandingan dalam pelaksanaan penelitian. Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang dikemas dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1: **Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
1.	Akai dan Sakata (2002)	Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence for State Level Cross Section Data for The United States	Untuk mengetahui kontribusi antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi	Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect Model</i>)	Desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak menunjukkan bagaimana desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
2.	Rodriguez-Pose dan Kroijer (2009)	Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe	Untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi	Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect Model</i>)	Ada hubungan negatif yang signifikan dua dari tiga indikator desentralisasi fiskal yang yakni sisi pengeluaran dan sisi transfer sedangkan sisi pendapatan pajak berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi

No.	Penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
3.	Rustan (2013)	Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, serta kaitannya dengan Otonomi Daerah	Untuk mengetahui hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect Model</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Desentralisasi fiskal memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pendapatan dan pendapatan asli daerah. Namun mengidentifikasi juga bahwa dari sisi pengeluaran pemerintah daerah masih perlu ditata sehingga tidak didominasi oleh belanja pegawai dan belanja administratif Efek agregat otonomi daerah telah membawa perubahan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan dan diperkuat lagi.
4.	Nguyen dan Anwar (2011)	Fiscal Decentralization and Economic Growth in Vietnam	Untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi	Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect Model</i>)	Pengaruh desentralisasi pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam negatif, sedangkan pengaruh desentralisasi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi positif

No.	Penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
5.	Yuskhov (2015)	Fiscal Desentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirics, and The Russian Experience	Untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi	Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect Model</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel desentralisasi dari sisi penerimaan, pengeluaran, dan otonomi memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan Pemerintah daerah di Rusia tidak memiliki insentif untuk membelanjakan anggaran secara lebih efisien • Sedangkan sisi dana transfer berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
6.	Kusuma (2013)	Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi	Regresi Data Panel (<i>Random Effect Model</i>)	Rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah, indikator desentralisasi yang diwakili kemampuan dana transfer terhadap pembentukan pendapatan daerah serta kontribusi PAD terhadap total pendapatan berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama dari kontribusi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Sumber: Peneliti, 2018

Dalam banyak jurnal ilmiah, penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2002) ini banyak disinggung dan dikutip dalam penelitian tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini melihat hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di 50 negara bagian di Amerika Serikat tahun 1992-1996. Variabel-variabel yang digunakan yakni pertumbuhan PDB per kapita sebagai variabel dependen dan variabel independennya ialah indikator desentralisasi fiskal dan variabel kontrol. Adapun pengukuran indikator desentralisasi fiskal menurut Akai dan Sakata ada empat pengukuran antara lain *Revenue Indicator* (RI), *Production Indicator* (PI), *Autonomy Indicator* (AI), dan *Production-revenue Indicator* (PRI). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak menunjukkan bagaimana desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berikutnya Rodriguez-Pose dan Kroijer (2009) menjelaskan pengaruh antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan pengukuran variabel desentralisasi fiskal yang berbeda. Variabel tersebut diukur melalui tiga indikator yaitu pengeluaran pemerintah provinsi sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah, pendapatan pajak sebagai persentase total penerimaan dan dana transfer pemerintah provinsi, dan dana transfer sebagai persentase dari total penerimaan pemerintah provinsi ditambah dana dana transfer dari pusat. Selain itu variabel independennya juga menggunakan variabel kontrol serta variabel dependen menggunakan pertumbuhan PDB per kapita. Penelitian ini menggunakan sampel 16 negara di Eropa Timur dan Tengah (CEE). Hasil penelitian bertolak belakang dengan hasil yang diinginkan yaitu ternyata desentralisasi fiskal, dari sisi pengeluaran dan penerimaan dana transfer memiliki

pengaruh negatif yang signifikan kecuali penerimaan pajak berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Rustan (2013) meneliti di 19 Provinsi di Indonesia dengan periode tahun 1994-2010. Penelitian ini mereplika pengukuran desentralisasi fiskal, penggunaan variabel kontrol dan model penelitian berdasarkan Akai dan Sakata (2002). Namun perbedaan penelitian Rustan ialah menambah variabel dummy otonomi daerah dan dummy desentralisasi fiskal. Penelitian ini menghasilkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pendapatan dan pendapatan asli daerah. Namun mengidentifikasi juga bahwa dari sisi pengeluaran pemerintah daerah masih perlu ditata sehingga tidak didominasi oleh belanja pegawai dan belanja administratif. Selain itu, Efek agregat otonomi daerah telah membawa perubahan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan dan diperkuat lagi.

Penelitian tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan sampel dari 61 provinsi di Vietnam pada periode tahun yakni 1997-2001 dan 2002-2007 oleh Nguyen dan Anwar (2011). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dari sisi penerimaan berpengaruh positif dan sisi pengeluaran berpengaruh negatif. Pengukuran desentralisasi fiskal di penelitian ini sisi pengeluaran (persentase pengeluaran provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah secara keseluruhan dan sisi penerimaan (persentase penerimaan provinsi terhadap total penerimaan pemerintah secara keseluruhan. Lalu variabel independen lainnya antara lain ekspor, modal manusia, tenaga kerja, teknologi, inflasi, perkembangan keuangan, dan nilai tambah industri.

Kemudian penelitian internasional lainnya yakni Yuskhov (2015) yang meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di

negara Rusia. 78 daerah di Rusia diteliti dengan menggunakan dua periode tahun 2005-2008 dan 2008-2012. Variabel yang digunakan sama dengan penelitian-penelitian yang lain pada variabel dependennya yakni pertumbuhan PDB per kapita serta menggunakan variabel independen berupa indikator desentralisasi fiskal dan variabel kontrol. Akan tetapi, indikator untuk desentralisasi disini berbeda diantaranya sisi penerimaan terukur rasio penerimaan yang dihasilkan sendiri (tanpa transfer) terhadap gabungan total pendapatan semua daerah, sisi pengeluaran yaitu rasio pengeluaran daerah (tidak termasuk dana transfer dari pusat) terhadap gabungan total pengeluaran semua daerah, sisi dana transfer yakni rasio dana transfer suatu daerah terhadap gabungan total pendapatan semua daerah, dan sisi otonomi diukur melalui rasio pendapatan yang dihasilkan sendiri dari semua daerah terhadap gabungan total pendapatan semua daerah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah variabel desentralisasi dari sisi penerimaan, pengeluaran, dan otonomi memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan Pemerintah daerah di Rusia tidak memiliki insentif untuk membelanjakan anggaran secara lebih efisien, sedangkan sisi dana transfer berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Dan terakhir penelitian dari Kusuma (2013) yang meneliti di Indonesia dengan menggunakan kabupaten/kota di Provinsi Jawa dan Sulawesi, dengan diharapkan dapat menggambarkan pulau Jawa dengan mewakili Indonesia bagian barat dan Sulawesi mewakili Indonesia bagian tengah dan timur. Penggunaan variabel penelitian ini pertumbuhan PDRB sebagai variabel dependen dan untuk variabel dependennya ialah desentralisasi fiskal dan variabel kontrol. Pengukuran desentralisasi fiskal ada tiga yaitu rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah, indikator desentralisasi yang diwakili kemampuan dana transfer terhadap pembentukan pendapatan daerah serta kontribusi PAD terhadap

total pendapatan. Sehingga hasil penelitian menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal dengan pengukuran diatas berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

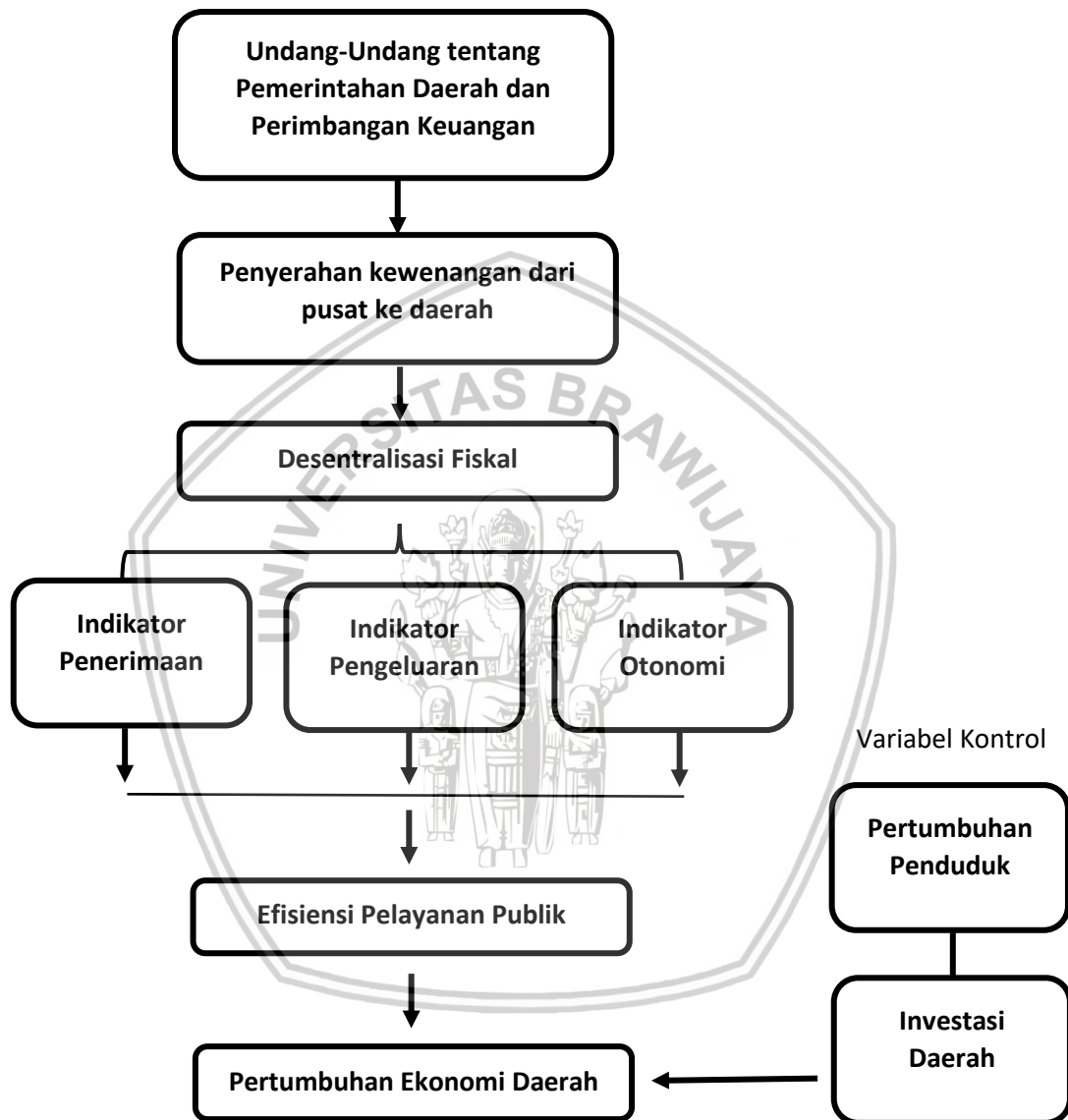
2.6 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran memberikan penjelasan singkat mengenai kerangka pikir yang dibuat serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berawal dari diterbitkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Perimbangan Keuangan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terjadi di segala daerah di Indonesia mulai dari bagian barat sampai timur. Dengan begitu setiap pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam mengatur urusan keuangannya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat masih tetap menyuntik dana berupa dana transfer bagi setiap daerah dengan porsi yang berbeda-beda. Sehingga itulah yang dinamakan desentralisasi fiskal.

Dalam penelitian ini pengukuran desentralisasi fiskal menggunakan tiga indikator yaitu indikator penerimaan, indikator pengeluaran, dan indikator otonomi. Pengukuran tersebut direpresentasikan berdasarkan rasio, sehingga jika nilai rasio yang dihasilkan besar maka kewenangan di suatu daerah tinggi. Artinya daerah tersebut mampu dan berhasil dalam mengelola daerah dengan benar berupa menciptakan efisiensi dalam penggunaan dana baik dari dana transfer maupun penerimaan yang dihasilkan sendiri oleh daerah yang bersangkutan mengenai pelayanan publik. Selain desentralisasi fiskal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian itu juga menggunakan variabel yang dijadikan variabel kontrol yang secara teori dan merujuk penelitian terdahulu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk dan investasi.

Sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1: **Kerangka Pemikiran**



Sumber: Peneliti, 2018

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah yang telah dikemukakan pada Bab II. Hipotesis ini masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disampaikan diatas, maka perlu dibuat hipotesis yaitu bahwa desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator penerimaan, indikator pengeluaran, dan indikator otonomi akan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan untuk menguji hipotesis penelitian melalui proses pengumpulan data empiris atau informasi yang digunakan. Metode penelitian digunakan untuk memahami objek yang menjadi tujuan penelitian, oleh karena itu metode harus sesuai dengan dengan tujuan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menurut analisis datanya termasuk penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menurut datanya berbentuk angka atau banyak disajikan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya (Arikunto, 2006). Sementara menurut Sugiyono (2011), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan rancangan pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu Provinsi yang berada pada kawasan timur di Indonesia yaitu Provinsi Papua, dengan mengambil tempat di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Pemilihan lokasi tersebut tepat karena berdasarkan data atau fakta, Daerah ini memiliki keistimewaan daripada daerah lainnya dalam rangka memenuhi hak otonomi khusus dengan diberikannya dana

yang berjumlah besar berupa dana otonomi khusus dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi serta dana transfer yang nominalnya lebih tinggi daripada daerah lain, oleh karena itu, Provinsi Papua ini dirasa unik untuk diteliti dari segi desentralisasi fiskalnya.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Pada penelitian kuantitatif diperlukan adanya uraian mengenai definisi atau definisi operasional dan pengukuran atas semua variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidakjelasan makna variabel yang digunakan serta memberikan batasan yang tegas pada variabel. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti serta memberikan suatu informasi yang diperlukan guna mengetahui cara mengukur suatu variabel. Berikut merupakan definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Variabel pertumbuhan ekonomi ini direpresentasikan dalam laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan 2010.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua diantaranya adalah variabel desentralisasi fiskal dan variabel kontrol.

a. Desentralisasi Fiskal

Dalam mengukur desentralisasi fiskal, metode yang umum diterapkan adalah dengan menggunakan ukuran-ukuran akuntansi yaitu ukuran

pendapatan dan ukuran pengeluaran yang menunjukkan ukuran alokasi kewenangan. Dalam penelitian ini pengukuran desentralisasi fiskal menggunakan tiga dari empat indikator yaitu indikator penerimaan, indikator pengeluaran, dan indikator otonomi (Akai dan Sakata, 2002). Adapun ketiga indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator penerimaan (RI) adalah rasio penerimaan pemerintah lokal terhadap gabungan dari penerimaan pemerintah lokal dan negara bagian di masing-masing negara bagian. Penerimaan lokal yang digunakan dalam penelitian ini dari penerimaan Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Sedangkan penerimaan gabungan ialah penerimaan Provinsi.
- Indikator pengeluaran (PI) rasio pengeluaran pemerintah lokal terhadap gabungan dari pengeluaran pemerintah lokal dan negara bagian di masing-masing negara bagian. Pengeluaran daerah yang digunakan dalam penelitian ini dari pengeluaran Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Sedangkan pengeluaran gabungan ialah pengeluaran Provinsi
- Indikator otonomi (AI) adalah indikator yang menunjukkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Ukuran dari otonomi daerah akan besar jika semua kebutuhan keuangan di daerah tersebut mampu dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah setempat, meskipun rasio penerimaan dan pengeluaran kecil. Dengan demikian, pertimbangan tingkat kemandirian daerah menjadi sangat penting dalam mengukur desentralisasi fiskal. Indikator ini diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerahnya.

3. Variabel Kontrol (*Control Variable*)

Umumnya, terdapat banyak faktor selain desentralisasi fiskal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, untuk

mengontrol pengaruh faktor-faktor lainnya dan untuk meningkatkan ketahanan hasil yang diperoleh, digunakan sekumpulan variabel-variabel kontrol (Jin dan Zou, 2005 dalam Tsalits, 2017). Berikut adalah penjelasan variabel-variabel kontrol dalam penelitian:

a. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Variabel ini diukur dengan tingkat pertumbuhan penduduk tiap Kabupaten/Kota dalam satuan persen.

b. Investasi

Menggambarkan tingkat investasi daerah, diukur dengan rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB dalam satuan persen.

3.4 Penentuan Model

Model analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi, dengan pengertian studi mengenai ketergantungan suatu variabel, yakni variabel dependen, terhadap satu atau lebih variabel lainnya, yaitu variabel penjelas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memperkirakan nilai rerata atau rata-rata (populasi) variabel dependen dari nilai yang diketahui atau nilai tetap dari variabel penjelas (dalam sampling berulang-*repeated sampling*) (Gujarati dan Porter, 2013). Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada adalah menggunakan model regresi data panel.

Penelitian ini mengambil tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan untuk variabel independen adalah desentralisasi fiskal dengan

pengukuran tiga indikator. Beserta variabel kontrol. Model regresi yang digunakan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Yuskhov (2015). Adapun model regresinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$GDP_{it} = \beta_D DEC_{it}(RI, PI, AI) + \beta_x x_{it}(POP, INV) + \varepsilon_{it}$$

Pada penelitian ini model dibagi menjadi tiga macam model karena secara teori serta penelitian terdahulu (Akai dan Sakata, 2002) menjelaskan bahwa pada variabel desentralisasi fiskal diukur melalui tiga indikator yang berbeda. Di setiap masing-masing indikator tersebut mencerminkan desentralisasi fiskal.

$$1) GDP_{it} = \beta_D DEC_{it}(RI) + \beta_x x_{it}(POP, INV) + \varepsilon_{it}$$

$$2) GDP_{it} = \beta_D DEC_{it}(PI) + \beta_x x_{it}(POP, INV) + \varepsilon_{it}$$

$$3) GDP_{it} = \beta_D DEC_{it}(AI) + \beta_x x_{it}(POP, INV) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

GDP_{it} : tingkat pertumbuhan PDRB per kapita (%)

DEC_{it} : Desentralisasi fiskal (%)

RI : Indikator penerimaan (%)

PI : Indikator pengeluaran (%)

AI : Indikator otonomi (%)

x_{it} : Variabel kontrol (%)

POP : Pertumbuhan penduduk (%)

INV : Investasi daerah (%)

β : Koefisien regresi

i : daerah

t : waktu

ε_{it} : Error

3.5 Data dan Sumber Data

Untuk menggambarkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya serta telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Disamping itu, data yang digunakan data panel di mana gabungan dari data *cross-section* dan *time series*. Data *cross-section* yang digunakan adalah data 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua diantaranya 28 Kabupaten dan 1 Kota, sementara data *time series* yaitu rentang waktu data yang diteliti antara tahun 2011-2016.

Data yang dimaksud diatas meliputi data pertumbuhan ekonomi, data terkait desentralisasi fiskal berupa Realisasi APBD per Kabupaten/Kota, data ketenagakerjaan dan kependudukan. Dari data-data sekian banyak itu, sumber data penelitiannya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Badan Pusat Statistik (BPS) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, dan literatur lainnya.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Menurut Gujarati dan Porter (2013), Data panel adalah kombinasi elemen untuk data runtut waktu (*time series*) dan data *cross-section*. Dalam pengolahan data digunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan Eviews versi 10. Dalam model regresi data panel terdapat tiga teknik yang dapat digunakan, yaitu:

1) **Common Effect Model (CEM)**

Common Effect Model (CEM) merupakan model sederhana yaitu menggabungkan seluruh data time series dengan *cross section*, selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*). Model ini menganggap bahwa intersep dan slop dari setiap variabel sama untuk setiap objek observasi. Model ini merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya.

2) **Fixed Effect Model (FEM)**

Pada model ini, model panel memiliki intersep yang mungkin berubah-ubah untuk setiap individu dan waktu, di mana setiap unit *cross-section* bersifat tetap secara *time series*. Salah satu kesulitan prosedur data panel adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik *cross-section* maupun *time series*. Model ini selain dinamakan *fixed effect model* disebut juga dengan istilah lain yakni *Least Square Dummy Variable* (LSDV)

3) **Random Effect Model (REM)**

Dalam model ini perbedaan antar waktu dan antar individu diakomodasi lewat *error*. *Error* dalam model ini terbagi menjadi error untuk komponen individu, *error* komponen waktu, dan error gabungan. Keuntungan *random effect model* dibandingkan *fixed effect model* adalah dalam hal derajat kebebasannya. Tidak perlu dilakukan estimasi terhadap intersep *N cross-sectional*.

Pemilihan Model

Dalam pemilihan model yang terbaik dalam regresi data panel, pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji untuk memilih metode mana yang terbaik diantara ketiga metode tersebut antara lain dilakukan dengan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier*. Uji Chow dilakukan untuk menguji antara metode *common effect model* dan *fixed effect model*, sedangkan Uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect model* atau *random effect model*, dan Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk memilih antara *common effect model* dan *random effect model*. Berikut dijelaskan ketiga uji tersebut:

a) Uji Chow

Dalam melakukan uji chow, data diregresikan dengan menggunakan *common effect model* dan *fixed effect model* terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk diuji. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

H0 : *Common Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Chow adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *Prob. Cross section Chi-square* $\geq 0,05$ artinya H0 diterima, maka model yang dipilih adalah *common effect model*
2. Jika nilai *Prob. Cross section Chi-square* $< 0,05$ artinya H0 ditolak, maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*, dan dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan *fixed effect model* atau *random effect model*

Namun, Uji Hausman tidak perlu dilakukan apabila hasil Uji Chow menunjukkan bahwa H_0 diterima, atau dengan kata lain menyimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam persamaan regresi adalah *common effect model*.

b) Uji Hausman

Selanjutnya, untuk melakukan Uji Hausman, data diregresikan dengan *random effect model*, kemudian dibandingkan antara *fixed effect model* dan *random effect model* dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* $\geq 0,05$, maka H_0 diterima yang artinya model yang dipilih adalah *random effect model*
2. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* $< 0,05$, maka H_0 ditolak yang artinya model yang dipilih adalah *fixed effect model*

c) Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan untuk mengetahui apakah *random effect model* lebih baik dari *common effect model*. Uji signifikansi *random effect model* ini dikembangkan oleh *Breusch-Pagan*. Pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari *common effect model*.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-Square* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H1 : *Random Effect Model*

Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Square* maka H0 ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel ialah *random effect model*. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Square* maka H0 diterima yang artinya model yang tepat adalah *common effect model*. Atau dapat dilakukan melihat nilai *probability cross-section random*. Apabila nilainya berada di atas 0,05 atau tidak signifikan, maka H0 diterima dan jika berada di bawah 0,05 atau signifikan maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Analisis Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Model goodness of fit bertujuan untuk mengetahui apakah perumusan model sudah tepat atau fit. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi nilai F. jika hasil F hitung > F tabel maka model yang dirumuskan sudah tepat (*goodness of fit*). Pengujian ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan ukuran 5% atau 1%. Jika nilai probabilitas ditunjukkan > 5%, maka model ditolak, sedangkan jika < 5%, maka model diterima.

2. Koefisien Determinansi (*R-Squared*)

Koefisien determinansi (*R-squared*) menunjukkan seberapa besar persentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Nilai R-squared terletak antara 0 dan 1. Jika nilainya semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variabel independen. Hal ini tepat garis regresi tersebut mewakili hasil penelitian yang sebenarnya.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan acuan nilai alpha sebesar 5% (0,05). Hal ini berarti bahwa jika nilai probabilitas setiap variabel $< 5\%$ maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan ke variabel dependen, dan sebaliknya jika variabel independen memiliki nilai probabilitas $> 5\%$ maka variabel tersebut mempunyai atau tidak berpengaruh kepada variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai lingkup penelitian, hasil pengolahan data dan pembahasan dari hasil pengolahan data pada penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan tersebut meliputi deskripsi variabel pada model penelitian, hasil regresi, serta pembahasan dari analisis hasil estimasi pengujian.

4.1 Gambaran Umum Lingkup Penelitian

Sebelum membahas hasil penelitian akan dipaparkan mengenai gambaran umum lingkup penelitian. Provinsi Papua merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Kawasan timur Indonesia. Papua sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia yang memiliki bentuk pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan yang di Daerah menyebutkan secara tak langsung Papua ialah daerah otonom. Hal tersebut artinya bahwa Papua merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berhak dan wewenang serta berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI yang sesuai dengan UU berlaku.

Luas wilayah Provinsi Papua yang mencapai 319.036,05 km² dimana wilayah yang paling luas di Indonesia yang habis terbagi menjadi 29 Kabupaten/Kota terdiri dari 28 Kabupaten dan 1 Kota dengan diantaranya Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya,

Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai.

Meskipun memiliki wilayah terluas namun penduduk yang mendiami Provinsi Papua cenderung sedikit bahkan jumlah penduduk di Papua merupakan paling sedikit di Indonesia sebesar 3,2 juta jiwa dibandingkan total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia mencapai 261,9 juta jiwa sehingga hanya sekitar 1,22% penduduk Indonesia yang berada atau tinggal di Provinsi Papua. Selain itu, 80% penduduknya masih dalam keadaan terisolir di daerah pedalaman (bagian tengah papua).

4.2 Deskripsi Variabel

Pada deskripsi variabel akan dijelaskan setiap variabel pada penelitian sesuai rentang tahun dan kondisi serta diberikan analisis atas permasalahan di wilayah bersangkutan yakni di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

4.2.1 Deskripsi Desentralisasi Fiskal

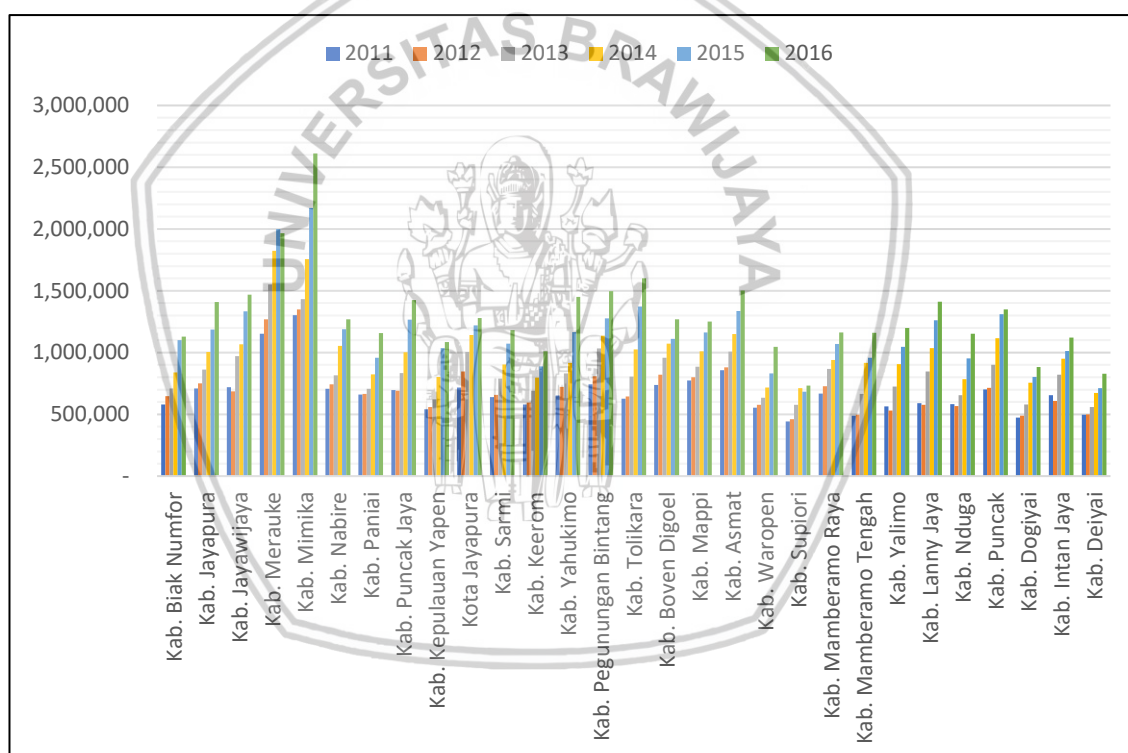
Dalam penelitian ini desentralisasi fiskal dilihat pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2011-2016, untuk menggambarkan desentralisasi fiskal ini digunakan tiga pengukuran berupa indikator penerimaan, indikator pengeluaran, dan indikator otonomi.

Indikator Penerimaan

Setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan menjadikan daerah-daerah di Indonesia disebut sebagai daerah otonom yang mana dituntut untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Terlebih lagi Papua ialah salah satunya merupakan daerah otonom, sehingga mendapatkan dana dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yakni disebut

dana perimbangan. Dana perimbangan ini terbagi menjadi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Namun diberikannya dana perimbangan tidak membuat atau kurang memberikan efek yang signifikan terhadap berkembangannya dan kemajuan di wilayah Papua. Dengan begitu terbitlah Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menjabarkan tentang diberikannya dana tambahan berupa dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur.

Gambar 4.1: Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua (dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Data diolah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Berdasarkan Gambar diatas Pendapatan daerah di 29 Kabupaten/Kota Provinsi Papua dominan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan yang paling tinggi diantaranya Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Kedua daerah ini memiliki penerimaan yang cukup besar baik dari pendapatan asli daerahnya

maupun dana perimbangan sebagai penyokong kenaikan tersebut. Selain itu, untuk daerah-daerah lain pun tetap mengalami kenaikan dikarenakan memperoleh dana perimbangan yang naik setiap tahunnya serta tambahan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur yang besar nominalnya.

Dalam pengukuran indikator penerimaan ini dijelaskan sebagai rasio penerimaan pemerintah lokal terhadap gabungan dari penerimaan pemerintah lokal dan negara bagian di masing-masing negara bagian. Penerimaan lokal yang digunakan dalam penelitian ini dari penerimaan Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Sedangkan penerimaan gabungan ialah penerimaan Provinsi. Sehingga semakin besar nilai rasio yang dihasilkan maka semakin besar wewenang yang diperoleh suatu daerah.

Pada tabel 4.1 menjelaskan mengenai Indikator Penerimaan Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2011-2016. Tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai rasio yang dihasilkan cukup bervariasi dan berfluktuatif. Dari 29 Kabupaten/Kota yang memiliki rasio tertinggi berturut-turut diantaranya Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke yang mencapai lebih dari 0,15 dari pada daerah lainnya hanya berkisar dibawah 0,15 tersebut. Tak dipungkiri pula di Provinsi Papua yang memegang penerimaan daerah yang paling tinggi berada pada Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke sehingga daripada itu nilai rasio yang diperoleh pun tinggi dan dapat disimpulkan kedua daerah tersebut memiliki wewenang yang paling tinggi daripada daerah-daerah yang lain. berkebalikan dengan kedua daerah tersebut, Kabupaten Supiori, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai memiliki wewenang yang kecil dikarenakan nilai rasio setiap tahunnya sangat kecil dibandingkan daerah lainnya. Begitu pula dengan pendapatan daerahnya pada gambar 4.1 terlihat bahwa pendapatan ketiga daerah ini juga cenderung paling kecil.

Tabel 4.1: Indikator Penerimaan Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Biak Numfor	0.093	0.087	0.084	0.078	0.093	0.090
Kab. Jayapura	0.114	0.101	0.103	0.094	0.100	0.112
Kab. Jayawijaya	0.116	0.092	0.116	0.100	0.113	0.117
Kab. Merauke	0.185	0.170	0.185	0.176	0.169	0.157
Kab. Mimika	0.209	0.181	0.171	0.164	0.184	0.208
Kab. Nabire	0.113	0.100	0.097	0.098	0.101	0.101
Kab. Paniai	0.106	0.089	0.084	0.077	0.081	0.092
Kab. Puncak Jaya	0.112	0.093	0.099	0.094	0.107	0.113
Kab. Kepulauan Yapen	0.087	0.075	0.074	0.075	0.088	0.086
Kota Jayapura	0.115	0.114	0.120	0.107	0.103	0.102
Kab. Sarmi	0.103	0.088	0.094	0.084	0.091	0.094
Kab. Keerom	0.093	0.080	0.082	0.072	0.075	0.080
Kab. Yahukimo	0.105	0.097	0.099	0.085	0.099	0.115
Kab. Pegunungan Bintang	0.119	0.108	0.123	0.106	0.108	0.119
Kab. Tolikara	0.101	0.086	0.096	0.096	0.116	0.127
Kab. Boven Digoel	0.118	0.110	0.114	0.100	0.094	0.101
Kab. Mappi	0.124	0.107	0.105	0.094	0.099	0.100
Kab. Asmat	0.138	0.118	0.120	0.107	0.113	0.120
Kab. Waropen	0.089	0.077	0.076	0.067	0.070	0.083
Kab. Supiori	0.071	0.062	0.069	0.066	0.058	0.058
Kab. Mamberamo Raya	0.107	0.097	0.103	0.088	0.091	0.093
Kab. Mamberamo Tengah	0.079	0.066	0.079	0.086	0.081	0.092
Kab. Yalimo	0.091	0.071	0.086	0.085	0.089	0.095
Kab. Lanny Jaya	0.095	0.077	0.101	0.097	0.107	0.112
Kab. Nduga	0.093	0.076	0.078	0.073	0.081	0.092
Kab. Puncak	0.113	0.096	0.107	0.104	0.111	0.107
Kab. Dogiyai	0.076	0.065	0.069	0.071	0.068	0.070
Kab. Intan Jaya	0.105	0.081	0.098	0.089	0.086	0.089
Kab. Deiyai	0.080	0.067	0.067	0.063	0.060	0.066

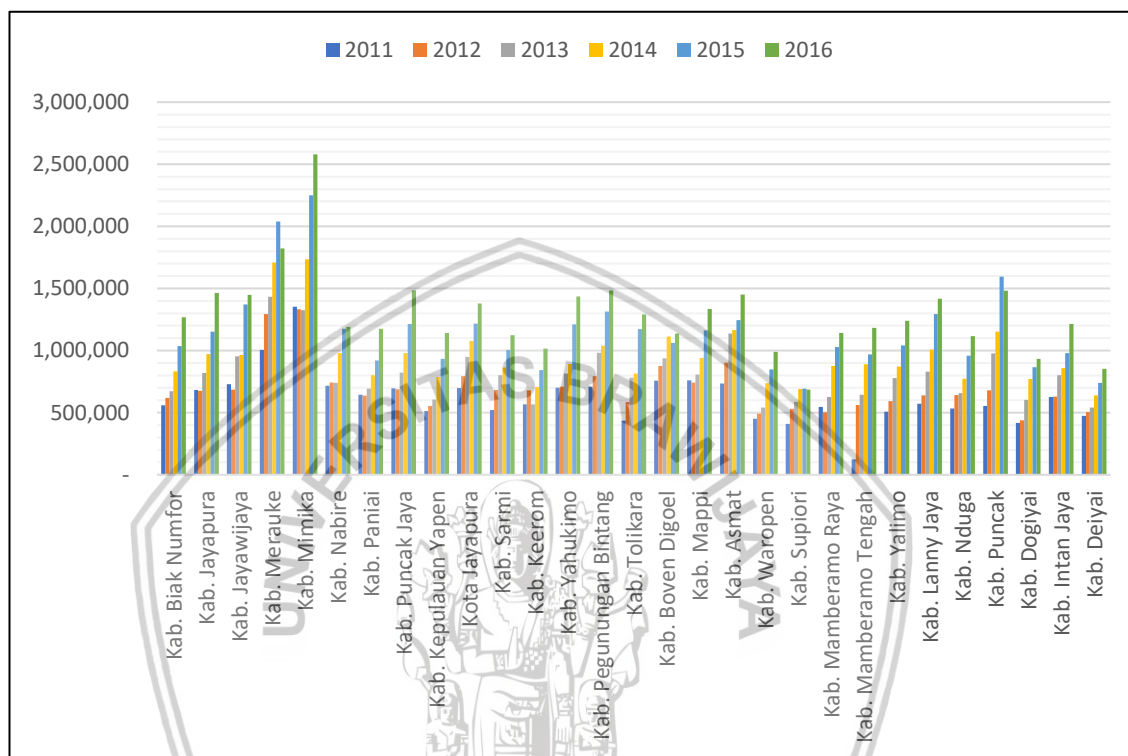
Sumber: Data diolah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Indikator Pengeluaran

Seiring dengan bertambahnya dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota Provinsi Papua dalam rangka desentralisasi fiskal sekaligus berlakunya otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadikan Penerimaan terlampaui tinggi. Hal itu pula

tentu mengindikasikan bahwa belanja daerah di setiap daerah pun akan mengalami kenaikan serupa tiap tahunnya.

Gambar 4.2: Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua (dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Data diolah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Gambar 4.2 membuktikan bahwa semua daerah di Papua mengalami kenaikan belanja daerah dikarenakan mengikuti pendapatan yang naik pula. Akan tetapi jika ditelaah secara teliti bahwa dalam nominal bahkan dalam grafik pun terlihat terdapat daerah-daerah tertentu dengan membelanjakan uang mereka melebihi pendapatan yang dihasilkannya salah satunya ialah Kabupaten Puncak. Selain itu, grafik diatas menyimpulkan daerah yang mencapai belanja tertinggi yaitu Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika. Hal ini tampak jelas dikarenakan kedua daerah tersebut juga memiliki pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu tidak heran jikalau belanja daerahnya juga tertinggi.

Tabel 4.2: Indikator Pengeluaran Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Biak Numfor	0.091	0.087	0.085	0.083	0.084	0.106
Kab. Jayapura	0.111	0.095	0.103	0.097	0.093	0.122
Kab. Jayawijaya	0.118	0.096	0.120	0.096	0.111	0.121
Kab. Merauke	0.162	0.182	0.181	0.171	0.165	0.152
Kab. Mimika	0.219	0.187	0.167	0.173	0.181	0.216
Kab. Nabire	0.116	0.104	0.093	0.098	0.095	0.100
Kab. Paniai	0.104	0.089	0.087	0.080	0.074	0.098
Kab. Puncak Jaya	0.112	0.097	0.104	0.098	0.098	0.124
Kab. Kepulauan Yapen	0.083	0.078	0.076	0.079	0.075	0.095
Kota Jayapura	0.113	0.111	0.120	0.107	0.098	0.115
Kab. Sarmi	0.084	0.096	0.101	0.086	0.081	0.094
Kab. Keerom	0.092	0.096	0.071	0.071	0.068	0.085
Kab. Yahukimo	0.113	0.100	0.103	0.089	0.098	0.120
Kab. Pegunungan Bintang	0.115	0.111	0.124	0.104	0.106	0.124
Kab. Tolikara	0.071	0.082	0.098	0.081	0.095	0.108
Kab. Boven Digoel	0.123	0.123	0.118	0.111	0.086	0.095
Kab. Mappi	0.123	0.104	0.102	0.094	0.094	0.112
Kab. Asmat	0.119	0.127	0.143	0.116	0.101	0.121
Kab. Waropen	0.073	0.069	0.068	0.070	0.068	0.083
Kab. Supiori	0.066	0.075	0.074	0.069	0.056	0.057
Kab. Mamberamo Raya	0.088	0.071	0.079	0.087	0.083	0.095
Kab. Mamberamo Tengah	0.020	0.079	0.081	0.089	0.078	0.099
Kab. Yalimo	0.082	0.083	0.098	0.087	0.084	0.104
Kab. Lanny Jaya	0.092	0.090	0.105	0.101	0.104	0.118
Kab. Nduga	0.086	0.090	0.083	0.077	0.077	0.093
Kab. Puncak	0.090	0.095	0.123	0.115	0.129	0.124
Kab. Dogiyai	0.068	0.062	0.076	0.077	0.070	0.078
Kab. Intan Jaya	0.101	0.088	0.101	0.086	0.079	0.101
Kab. Deiyai	0.077	0.071	0.068	0.064	0.060	0.071

Sumber: Data diolah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Indikator pengeluaran ini dijelaskan sebagai rasio pengeluaran pemerintah lokal terhadap gabungan dari pengeluaran pemerintah lokal dan negara bagian di masing-masing negara bagian. Pengeluaran daerah yang digunakan dalam penelitian ini dari pengeluaran Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Sedangkan

pengeluaran gabungan ialah pengeluaran Provinsi. Sehingga semakin besar nilai rasio yang dihasilkan maka semakin besar wewenang daerah tersebut.

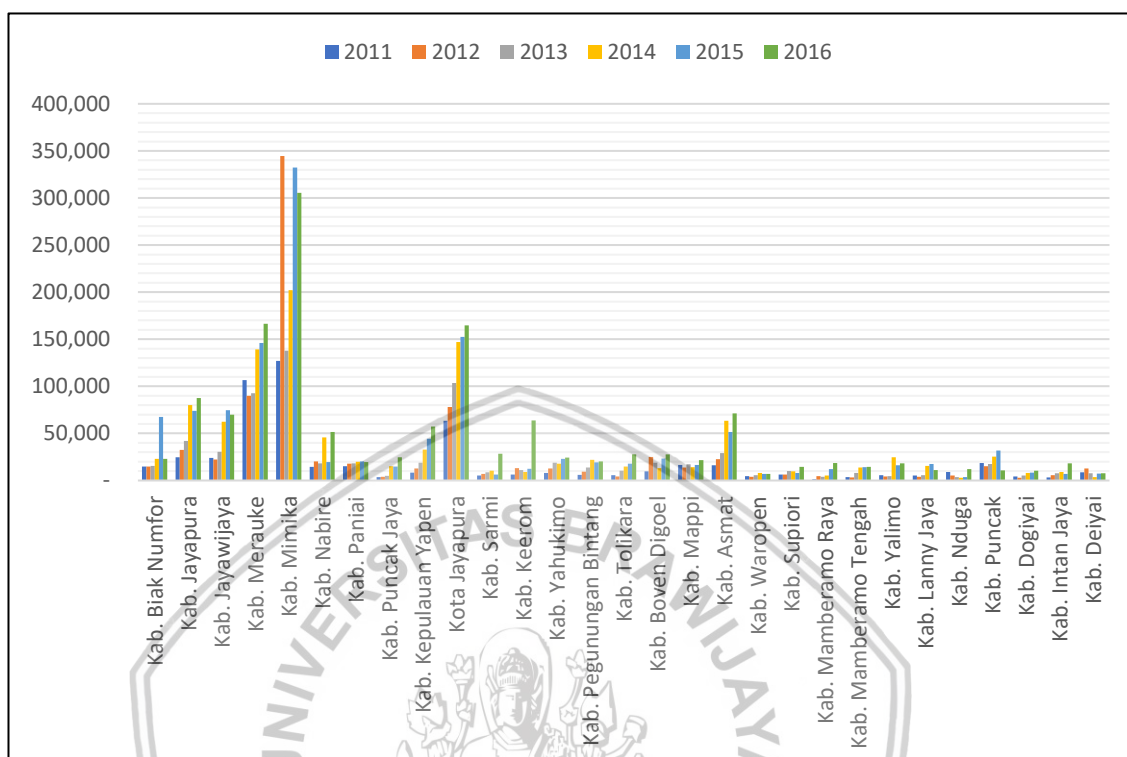
Tabel 4.2 menjelaskan mengenai indikator pengeluaran bahwa nilai-nilai rasio yang diperoleh dari perhitungan Kabupaten/Kota Provinsi Papua tiap daerahnya selalu fluktuatif setiap tahun. Akan tetapi, kewenangan terbesar dipegang oleh Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika karena nilai rasionya lebih tinggi dari pada daerah lain. hal ini pun sudah tercermin dari sisi belanja daerah tertinggi di Papua yaitu kedua daerah tersebut. Dan tak jauh berbeda pula nilai rasio terkecil mengindikasikan suatu daerah memiliki wewenang kecil pula diantaranya Kabupaten Supiori, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai.

Indikator Otonomi

Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah bahwa daerah otonom dituntut untuk mengatur rumah tangganya sendiri terlebih menggalai potensi penerimaannya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Kabupaten/Kota di Provinsi Papua memiliki luas wilayah yang sangat luas di Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Namun kekurangannya, masyarakat Papua disini tidak tahu menahu dalam pengelolaannya, dengan lebih spesifik lagi modal manusia di Papua ini sangat rendah. Oleh karena itu, akan berdampak pada penerimaan daerah yakni pendapatan asli daerah setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua mengalami penurunan bahkan nominalnya kecil.

Gambar 4.3: **Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua (dalam Jutaan Rupiah)**



Sumber: Data diolah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Pendapatan Asli Daerah di setiap daerah Provinsi Papua tidaklah terlalu tinggi atau memang sangat kecil sekali dibandingkan dengan daerah-daerah wilayah Indonesia lainnya di bagian barat dan tengah. Perbedaan mendasarnya ialah meskipun wilayah barat dan tengah tidak terlalu kaya akan sumberdaya alam akan tetapi memiliki modal manusia yang berkualitas tinggi serta jumlah penduduk yang banyak sehingga memicu PAD yang dihasilkan lebih besar. Terlebih lagi, wilayah Papua ini memiliki sedikit penduduk yang mengindikasikan pula PAD kecil. Dikarenakan semakin banyak penduduk maka semakin banyak pajak bahkan retribusi yang dapat diterima setiap daerah di Papua. Dengan jumlah nominal PAD yang kecil maka setiap daerah di Papua bisa jadi masih mengalami ketergantungan dari dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Tabel 4.3: Indikator Otonomi Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Biak Numfor	0.026	0.023	0.022	0.028	0.061	0.020
Kab. Jayapura	0.035	0.043	0.049	0.080	0.062	0.062
Kab. Jayawijaya	0.033	0.032	0.031	0.059	0.056	0.048
Kab. Merauke	0.093	0.071	0.060	0.076	0.073	0.085
Kab. Mimika	0.098	0.255	0.096	0.115	0.153	0.117
Kab. Nabire	0.021	0.027	0.222	0.043	0.016	0.041
Kab. Paniai	0.023	0.027	0.026	0.024	0.021	0.017
Kab. Puncak Jaya	0.005	0.006	0.006	0.015	0.012	0.017
Kab. Kepulauan Yapen	0.015	0.023	0.031	0.041	0.043	0.053
Kota Jayapura	0.088	0.092	0.103	0.129	0.125	0.129
Kab. Sarmi	0.008	0.011	0.011	0.012	0.006	0.024
Kab. Keerom	0.011	0.022	0.016	0.012	0.014	0.063
Kab. Yahukimo	0.012	0.018	0.023	0.019	0.020	0.017
Kab. Pegunungan Bintang	0.008	0.012	0.013	0.019	0.015	0.013
Kab. Tolikara	0.009	0.007	0.013	0.014	0.013	0.017
Kab. Boven Digoel	0.013	0.030	0.020	0.012	0.021	0.022
Kab. Mappi	0.021	0.017	0.019	0.014	0.014	0.017
Kab. Asmat	0.019	0.026	0.029	0.055	0.039	0.048
Kab. Waropen	0.008	0.007	0.009	0.011	0.008	0.007
Kab. Supiori	0.014	0.014	0.018	0.014	0.012	0.020
Kab. Mamberamo Raya	0.002	0.006	0.004	0.006	0.011	0.016
Kab. Mamberamo Tengah	0.007	0.007	0.012	0.015	0.015	0.012
Kab. Yalimo	0.010	0.008	0.006	0.027	0.015	0.015
Kab. Lanny Jaya	0.009	0.007	0.007	0.015	0.014	0.008
Kab. Nduga	0.015	0.009	0.005	0.004	0.004	0.010
Kab. Puncak	0.026	0.021	0.020	0.023	0.024	0.008
Kab. Dogiyai	0.009	0.006	0.009	0.010	0.010	0.012
Kab. Intan Jaya	0.005	0.009	0.009	0.010	0.007	0.016
Kab. Deiyai	0.017	0.025	0.014	0.006	0.010	0.009

Sumber: Data diolah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Indikator Otonomi lebih menekankan pada kemandirian fiskal pemerintah daerah. Ukuran dari otonomi daerah akan besar jika semua kebutuhan keuangan di daerah tersebut mampu dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah setempat, meskipun rasio penerimaan dan pengeluaran kecil. Dengan demikian, pertimbangan tingkat kemandirian daerah menjadi sangat penting dalam

mengukur desentralisasi fiskal. Indikator ini diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerahnya.

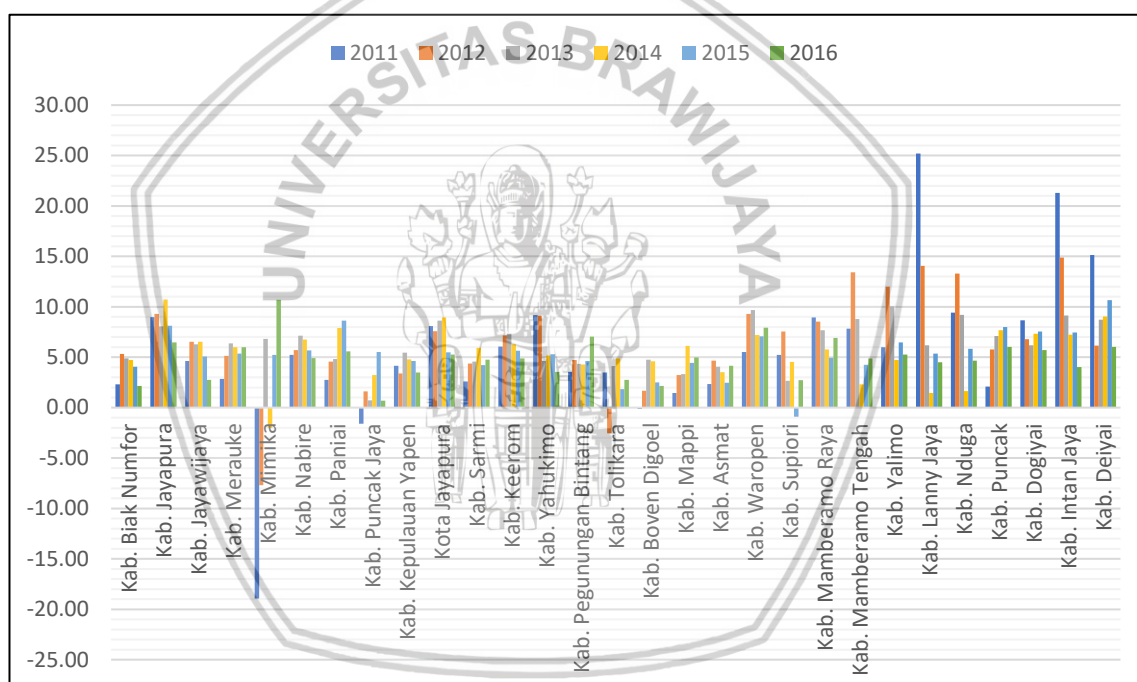
Tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Papua masih tergolong sangat memprihatinkan, terlihat setiap daerah nilai rasionya masih dikisaran angka dibawah 0,10 yang terpampang jelas pada tabel 4.3 tentang indikator otonomi. Nilai tersebut menjelaskan bahwa tingkat kemandirian fiskal di daerah tersebut sangat kurang atau dapat dikatakan belum mandiri dan masih tergantung pemberian dana dari Pemerintah Pusat. Namun hanya terdapat dua daerah yang masuk kategori kurang dengan nilai rasio diatas 0,10 dan tidak sampai mencapai angka 0,20 diantaranya Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika. Kedua daerah ini bisa dibilang daerah yang paling kaya dan banyak penduduknya. Oleh sebab itu, pendapatan asli daerahnya sedikit lebih tinggi namun tetap belum mandiri seperti halnya daerah lain.

4.2.2 Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi daerah dilihat dari pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2011-2016. Variabel ini menjelaskan semakin tinggi nilai pertumbuhan maka begitu juga semakin mencerminkan bertumbuhnya atau bertambahnya nilai tambah yang diperoleh setiap orang di tiap daerah Provinsi Papua. Pada grafik 4.4 terlihat pertumbuhan PDRB per kapita tiap daerah serentak mengalami fluktuasi dan beberapa sampai mengarah pada angka negatif yang menandakan bahwa daerah tersebut pertumbuhannya bersifat negatif diantaranya Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Supiori. Akan tetapi daerah-daerah tersebut kembali mengalami pertumbuhan positif di tahun berikutnya.

Penyebab fluktuatif tersebut dikarenakan nilai PDRB atau pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya di Provinsi Papua cenderung tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua memiliki nilai yang sangat tinggi melampaui pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia untuk tiap daerahnya dan berfluktuatif pula. Bagaimanapun dengan jumlah penduduk yang sedikit serta penopang Provinsi Papua ialah sektor tambang tidak heran jika pertumbuhan ekonomi di Papua menjulang tinggi.

Gambar 4.4: **Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Papua (dalam persen)**



Sumber: Data diolah BPS Provinsi Papua, 2018

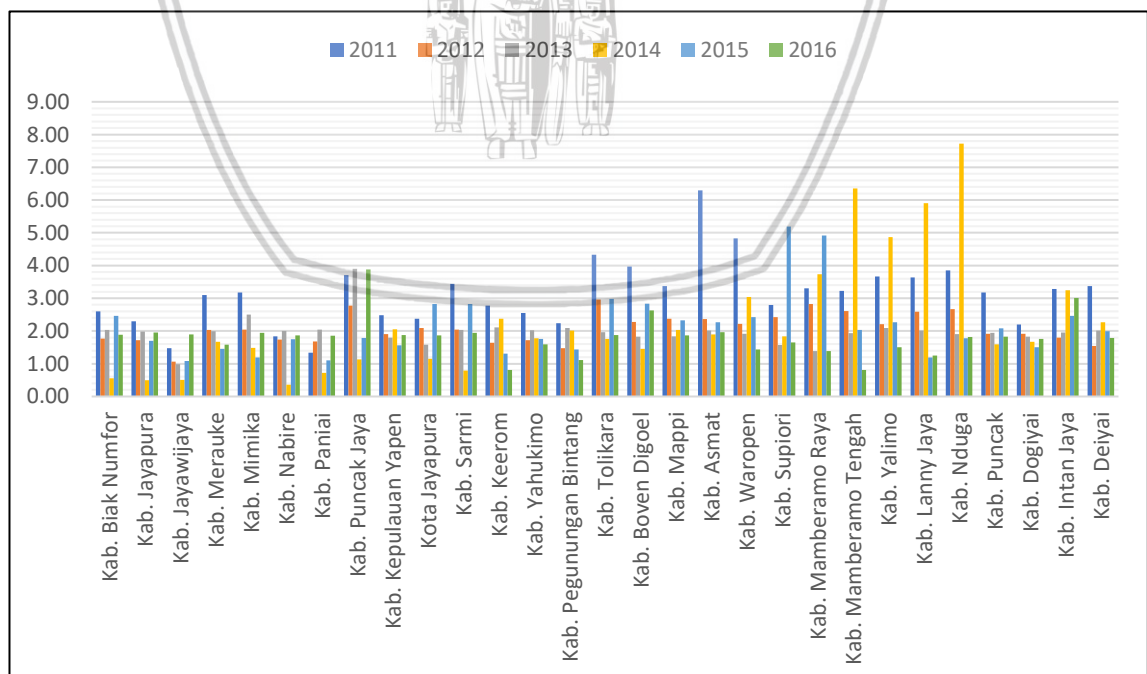
Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi tidak menjamin masyarakat makmur, hal ini lah yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Faktanya memang sektor tambang berperan penting di wilayah ini, namun tak sedikitpun nilai tambah dari sektor tersebut dirasakan bahkan dinikmati oleh mereka. Oleh karena itu, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil di Papua harus dihilangkan atau tidak disertakan sektor tambang. Dengan begitu angka pertumbuhan ekonomi

terlihat lebih stabil dan tidak terlampau tinggi dibandingkan sebelumnya menyertakan sektor tambang.

4.2.3 Deskripsi Pertumbuhan Penduduk

Variabel pertumbuhan penduduk dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Pada gambar 4.5 terpaparkan bahwa pertumbuhan penduduk di daerah-daerah Provinsi Papua cenderung fluktuatif serta tidak terlihat satupun daerah yang mencapai kenaikan terus menerus tiap tahunnya. Akan tetapi, hanya ada beberapa daerah yang pada tahun tertentu mengalami kenaikan yang cukup tinggi sekitar 6% (enam persen) keatas tetapi tak sampai menggapai angka 10% (sepuluh persen). Cenderung pencapaian keseluruhan daerah hanya terpatok angka dibawah 3% (tiga persen).

Gambar 4.5: **Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Papua (dalam persen)**



Sumber: Data diolah BPS Provinsi Papua, 2018

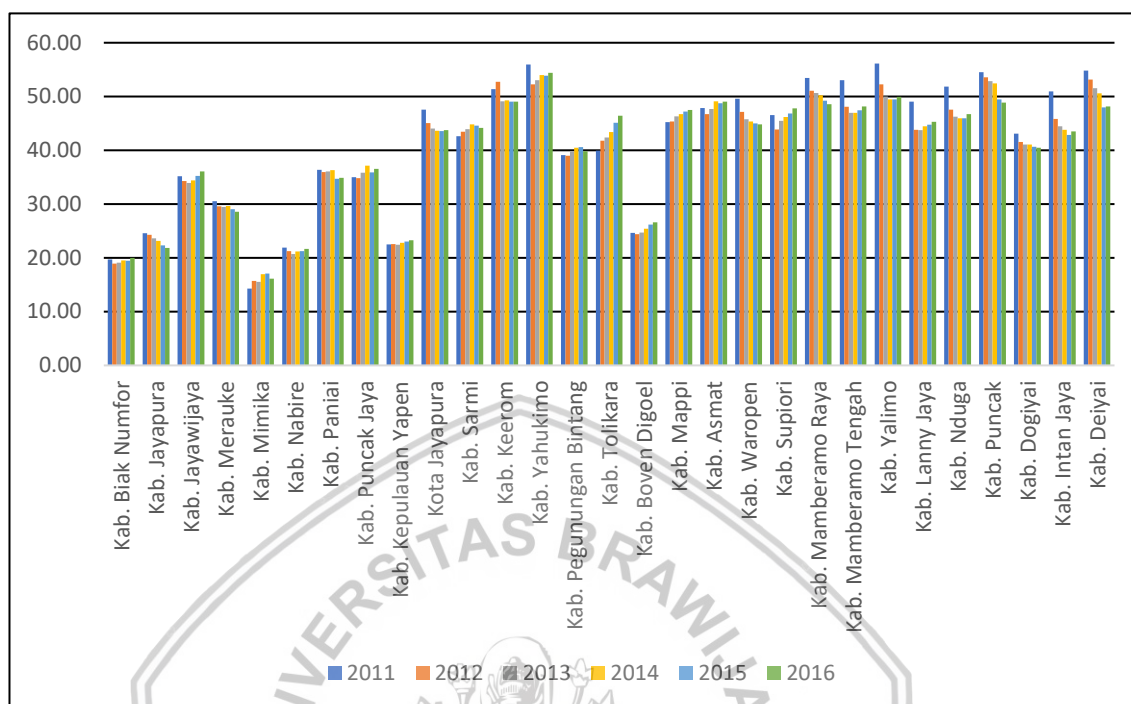
Pertumbuhan penduduk yang sangat kecil diindikasikan dari jumlah penduduk yang berada di Provinsi Papua sangatlah sedikit, tak dipungkiri jumlah penduduk di Provinsi Papua hanya sekitar 3,2 juta jiwa. Jika dibagi 29 daerah di Papua hanya tersisa setiap Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk berkisar antara 110 ribu jiwa bahkan dibawahnya. Hal ini pun dikarenakan pula Provinsi Papua jauh dari pusat ibukota sehingga menjadikan kurang maju daripada daerah tetangganya yang pada saat sebelum era desentralisasi fiskal cenderung Provinsi Papua kurang diperhatikan dan roda perekonomian hanya berputar-putar di pusat Pemerintahan oleh karena itu perkembangan Papua dari segi perekonomiannya tertinggal jauh. Oleh sebab itu, preferensi masyarakat lebih tidak tertuju untuk tinggal di wilayah timur tersebut.

4.2.4 Deskripsi Investasi Daerah

Pembentukan tetap modal bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB inilah yang menjelaskan tentang variabel investasi daerah pada penelitian ini. Lebih spesifiknya untuk menggambarkan investasi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua tahun 2011-2016 diukur dengan rasio PMTB terhadap PDRB tiap daerah.

Gambar 4.6 mencerminkan kondisi investasi daerah di Provinsi Papua dengan melihat kontribusi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di berbagai daerah. Dapat dilihat hampir semua daerah memiliki kontribusi diatas 40% terhadap PDRB. Selain itu, nilai PMTB di semua daerah mengalami kenaikan tiap tahunnya serta nilai rasionya cukup stabil.

Gambar 4.6: Rasio PMTB terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Papua
(dalam persen)



Sumber: Data diolah BPS Provinsi Papua, 2018

Hal ini tentu sebuah situasi yang baik sehingga kenaikan investasi daerah akan menyerap banyak tenaga kerja, yang dalam jangka panjang mengurangi ketimpangan perekonomian masyarakat serta menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Papua. Di Papua angka PMTB masih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan ekspor barang dan jasa karena kedua hal tersebutlah yang memiliki kontribusi terbesar. Akan tetapi, pada PMTB tidak kalah besarnya dan membuktikan capaian peningkatan setiap tahunnya.

4.3 Pemilihan Model Regresi

Pada analisis model regresi data panel, terdapat tiga Teknik dalam mengestimasi data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dalam menentukan Teknik estimasi

yang tepat tersebut dapat dilakukan pengujian model yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Penelitian ini terdapat tiga pengujian karena mengikuti penelitian terdahulu dan berdasarkan pada teori yang ada. Berikut merupakan hasil dari pengolahan data panel menggunakan *software/aplikasi Eviews 10* pada penelitian ini.

4.3.1 Pengujian Pertama

Dalam pengujian pertama terdapat variabel desentralisasi melalui pengukuran indikator penerimaan dan diikuti variabel kontrol sebagai variabel bebas sedangkan variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi dengan rumus sebagai berikut:

$$GDP_{it} = \beta_D DEC_{it}(RI) + \beta_x x_{it}(POP, INV) + \varepsilon_{it}$$

Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow atau *chow test* yakni pengujian untuk menentukan model Common Effect atau model Fixed Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Common Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Chow adalah sebagai berikut:

Prob. Cross section Chi-square $\geq 0,05$ artinya H0 diterima

Prob. Cross section Chi-square $< 0,05$ artinya H0 ditolak

Tabel 4.4: Hasil Uji Chow Pengujian Pertama

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.264583	(28,142)	0.0000
Cross-section Chi-square	86.471445	28	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section Chi-square* $< 0,05$ yaitu sebesar 0,0000 sehingga kesimpulannya *fixed effect model* yang dipilih. Untuk langkah selanjutnya dilakukan *Hausman Test* untuk mendapatkan kesimpulan model yang terbaik.

Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman atau *Hausman test* yakni pengujian untuk menentukan model Random Effect atau model Fixed Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji hausman adalah:

H0 : Model yang digunakan adalah *Random Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut:

Nilai probabilitas *Cross-section random* $\geq 0,05$, maka H0 diterima

Nilai probabilitas *Cross-section random* $< 0,05$, maka H0 ditolak

Tabel 4.5: Hasil Uji Hausman Pengujian Pertama

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.282255	3	0.0006

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross-section random* $< 0,05$ yaitu sebesar 0,0006 sehingga kesimpulannya *fixed effect model*

yang dipilih. Dari beberapa pengujian pemilihan model, maka dapat diputuskan bahwa model yang digunakan dalam analisis regresi pada pengujian pertama adalah *fixed effect model*. Oleh karena itu, Untuk langkah selanjutnya tidak perlu dilakukan Uji LM (*Lagrange Multiplier Test*).

4.3.2 Pengujian Kedua

Dalam pengujian kedua terdapat variabel desentralisasi melalui pengukuran indikator pengeluaran dan diikuti variabel kontrol sebagai variabel bebas sedangkan variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi dengan rumus sebagai berikut:

$$GDP_{it} = \beta_D DEC_{it}(PI) + \beta_x x_{it}(POP, INV) + \varepsilon_{it}$$

Uji Chow (*Chow Test*)

Tabel 4.6: Hasil Uji Chow Pengujian Kedua

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.991353	(28,142)	0.0000
Cross-section Chi-square	80.672666	28	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section Chi-square* < 0,05 yaitu sebesar 0,0000 sehingga kesimpulannya *fixed effect model* yang dipilih. Untuk langkah selanjutnya dilakukan *Hausman Test* untuk mendapatkan kesimpulan model yang terbaik.

Uji Hausman (*Hausman Test*)

Tabel 4.7: Hasil Uji Hausman Pengujian Kedua

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.672451	3	0.0086

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross-section random* < 0,05 yaitu sebesar 0,0086 sehingga kesimpulannya *fixed effect model* yang dipilih. Dari beberapa pengujian pemilihan model, maka dapat diputuskan bahwa model yang digunakan dalam analisis regresi pada pengujian kedua adalah *fixed effect model*.

4.2.3 Pengujian Ketiga

Dalam pengujian ketiga terdapat variabel desentralisasi melalui pengukuran indikator otonomi dan diikuti variabel kontrol sebagai variabel bebas sedangkan variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi dengan rumus sebagai berikut:

$$GDP_{it} = \beta_D DEC_{it}(AI) + \beta_x x_{it}(POP, INV) + \varepsilon_{it}$$

Uji Chow (*Chow Test*)

Tabel 4.8: Hasil Uji Chow Pengujian Ketiga

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.251418	(28,142)	0.0000
Cross-section Chi-square	86.196420	28	0.0000

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross section Chi-square* < 0,05 yaitu sebesar 0,0000 sehingga kesimpulannya *fixed effect model* yang dipilih. Untuk langkah selanjutnya dilakukan *Hausman Test* untuk mendapatkan kesimpulan model yang terbaik.

Uji Hausman (*Hausman Test*)

Tabel 4.9: Hasil Uji Hausman Pengujian Ketiga

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.791148	3	0.0081

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Prob. Cross-section random* < 0,05 yaitu sebesar 0,0081 sehingga kesimpulannya *fixed effect model* yang dipilih. Dari beberapa pengujian pemilihan model, maka dapat diputuskan bahwa model yang digunakan dalam analisis regresi pada pengujian ketiga adalah *fixed effect model*.

4.4 Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil dari uji chow dan uji hausman dari ketiga pengujian model regresi yang telah dilakukan, akhirnya didapatkan hasil bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik untuk regresi data panel pada penelitian ini. Berikut merupakan hasil dari pengolahan data panel *Fixed Effect Model* (FEM) untuk ketiga pengujian tersebut:

4.4.1 Pengujian Pertama

Tabel 4.10: Hasil Pengujian Pertama *Fixed Effect Model* (FEM), $\alpha = 5\%$

Variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
C	-16,22399	0,0184	Signifikan
RI	-0,791338	0,0080	Signifikan
POP	-0,828923	0,0015	Signifikan
INV	0,790750	0,0000	Signifikan
R-Squared: 0,506239			
Nilai Prob. (Uji F): 0,000000			

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai R-Squared atau koefisien determinasi bernilai 0,506239. Nilai R-Squared tersebut berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator penerimaan (RI), pertumbuhan penduduk (POP), dan investasi daerah (INV) mampu menjelaskan varians dari variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi

daerah sebesar 50.62%. Sedangkan 49,38% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pada uji f diperoleh hasil nilai dari probabilitas sebesar 0,000000. Hasil probabilitas tersebut lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05), yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator penerimaan (RI), pertumbuhan penduduk (POP), dan investasi daerah (INV) secara bersama-sama (simultan) telah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Adapun pada hasil uji t (parsial) terdapat hasil yang signifikan dari semua variabel diantaranya variabel desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator penerimaan (RI), pertumbuhan penduduk (POP), dan investasi daerah (INV) dengan memiliki nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0,0080; 0,0015; dan 0,0000 yang berada di bawah nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Namun perbedaanya, variabel desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator penerimaan (RI) dan pertumbuhan penduduk (POP) berpengaruh signifikan dan negatif sedangkan investasi daerah (INV) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan untuk investasi daerah nilai koefisiennya positif sedangkan kedua lainnya justru sebaliknya yakni bernilai negatif.

Nilai koefisien pada variabel desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator penerimaan (RI) yaitu sebesar -0,791338. Dengan asumsi variabel independen yang lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu persen) rasio pada indikator penerimaan maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,79%. Variabel pertumbuhan penduduk (POP) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,828923. Dengan asumsi variabel independen yang lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu

persen) pertumbuhan penduduk maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,82%. Dan terakhir, variabel investasi daerah (INV) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,790750. Dengan asumsi variabel independen yang lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu persen) rasio PMTB terhadap PDRB maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,79%.

4.4.2 Pengujian Kedua

Tabel 4.11: Hasil Pengujian Kedua *Fixed Effect Model (FEM)*, $\alpha = 5\%$

Variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
C	-15,51961	0,0375	Signifikan
PI	-0,358240	0,1138	Tidak Signifikan
POP	-0,955366	0,0003	Signifikan
INV	0,672299	0,0001	Signifikan
R-Squared: 0,490129			
Nilai Prob. (Uji F): 0,000000			

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai R-Squared atau koefisien determinasi bernilai 0,490129. Nilai R-Squared tersebut berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator pengeluaran (PI), pertumbuhan penduduk (POP), dan investasi daerah (INV) mampu menjelaskan varians dari variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 49.01%. Sedangkan 50,99% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pada uji f diperoleh hasil nilai dari probabilitas sebesar 0,000000. Hasil probabilitas tersebut lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05), yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator

pengeluaran (PI), pertumbuhan penduduk (POP), dan investasi daerah (INV) secara bersama-sama (simultan) telah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Adapun pada hasil uji t (parsial) terdapat hasil yang tidak signifikan dari variabel utama penelitian ini yakni variabel desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator pengeluaran (PI) dengan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1138 yang berada di atas nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal ini berarti, variabel desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator pengeluaran (PI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan hasil yang berbeda untuk variabel kontrol diantaranya pertumbuhan penduduk (POP) dan investasi daerah (INV) dengan memiliki nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0,0003 dan 0,0001 yang berada di bawah nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Sehingga bisa dikatakan, pertumbuhan penduduk (POP) berpengaruh signifikan dan negatif sedangkan investasi daerah (INV) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan untuk investasi daerah nilai koefisiennya positif sedangkan pertumbuhan penduduk bernilai negatif.

Nilai koefisien pada variabel pertumbuhan penduduk (POP) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,955366. Dengan asumsi variabel independen yang lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu persen) pertumbuhan penduduk maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,95%. Dan terakhir, variabel investasi daerah (INV) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,672299. Dengan asumsi variabel independen yang lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu persen) rasio PMTB terhadap PDRB maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,67%. Dan berhubung variabel desentralisasi fiskal

dari pengukuran indikator pengeluaran (PI) tidak berpengaruh signifikan maka tidak perlu adanya penjelasan seperti variabel kontrol mengenai nilai koefisien.

4.4.3 Pengujian Ketiga

Tabel 4.12: Hasil Pengujian Ketiga *Fixed Effect Model (FEM)*, $\alpha = 5\%$

Variabel	Koefisien	Nilai Prob. (Uji t)	Keterangan
C	-19,83654	0,0040	Signifikan
AI	-0,129105	0,3229	Tidak Signifikan
POP	-0,948297	0,0003	Signifikan
INV	0,700522	0,0001	Signifikan
R-Squared: 0,484609			
Nilai Prob. (Uji F): 0,000000			

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai R-Squared atau koefisien determinasi bernilai 0,484609. Nilai R-Squared tersebut berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator otonomi (AI), pertumbuhan penduduk (POP), dan investasi daerah (INV) mampu menjelaskan varians dari variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 48.46%. Sedangkan 51,54% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pada uji f diperoleh hasil nilai dari probabilitas sebesar 0,000000. Hasil probabilitas tersebut lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05), yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator otonomi (AI), pertumbuhan penduduk (POP), dan investasi daerah (INV) secara bersama-sama (simultan) telah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Adapun pada hasil uji t (parsial) terdapat hasil yang tidak signifikan dari variabel utama penelitian ini yakni variabel desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator otonomi (AI) dengan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3229 yang berada di atas nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal ini berarti, variabel desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator pengeluaran (PI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan hasil yang berbeda untuk variabel kontrol diantaranya pertumbuhan penduduk (POP) dan investasi daerah (INV) dengan memiliki nilai probabilitas secara berurutan sebesar 0,0003 dan 0,0001 yang berada di bawah nilai $\alpha = 5\%$ (0,05). Sehingga bisa dikatakan, pertumbuhan penduduk (POP) berpengaruh signifikan dan negatif sedangkan investasi daerah (INV) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan untuk investasi daerah nilai koefisiennya positif sedangkan pertumbuhan penduduk bernilai negatif.

Nilai koefisien pada variabel pertumbuhan penduduk (POP) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,948297. Dengan asumsi variabel independen yang lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu persen) pertumbuhan penduduk maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,94%. Dan terakhir, variabel investasi daerah (INV) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,700522. Dengan asumsi variabel independen yang lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu persen) rasio PMTB terhadap PDRB maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,70%. Dan berhubung variabel desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator otonomi (AI) tidak berpengaruh signifikan maka tidak perlu adanya penjelasan seperti variabel kontrol mengenai nilai koefisien.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pembahasan penelitian akan dijelaskan pembuktian hipotesis dalam berdasarkan rumusan masalah penelitian ini serta analisis hasil regresi dengan melihat kondisi faktual di daerah-daerah sebagai lingkup penelitian.

4.5.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak lepas dari pengaturan pembagian wewenang dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah sebagai otoritas yang berkuasa penuh atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini mencoba untuk membahas sejauh mana pengaruh desentralisasi fiskal melalui pengukuran indikator penerimaan, indikator pengeluaran, dan indikator otonomi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur melalui pertumbuhan PDRB per kapita.

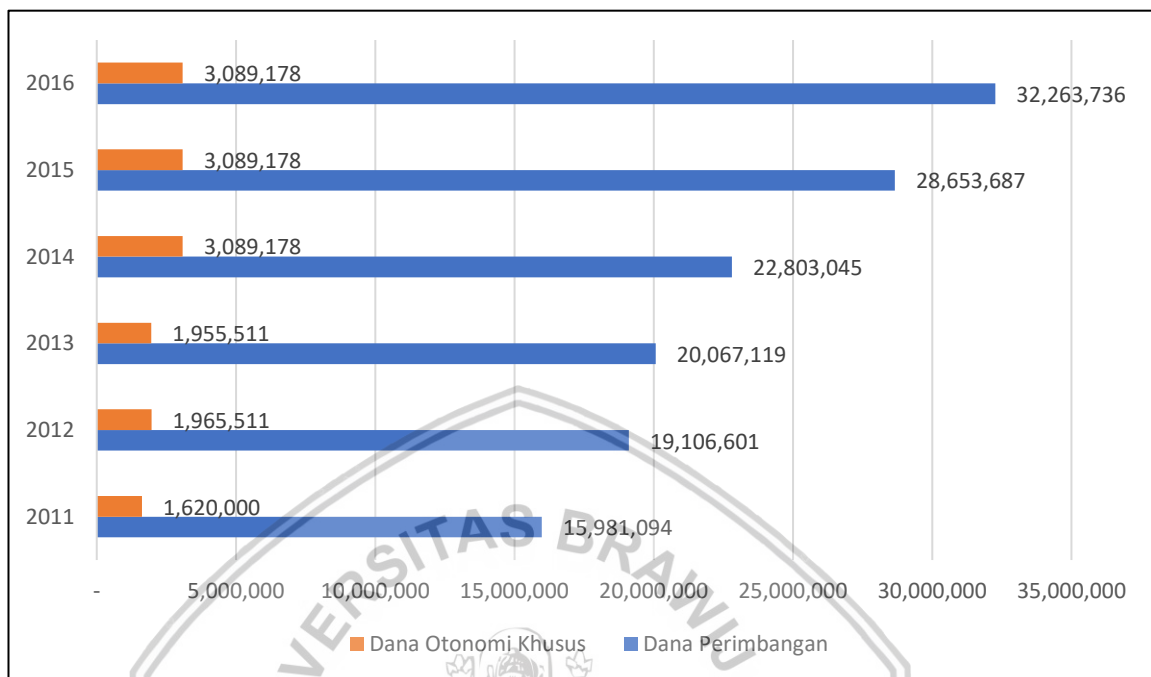
Indikator Penerimaan

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menganggap bahwa desentralisasi fiskal akan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Namun, hasil estimasi berkata lain dengan membuktikan bahwa variabel desentralisasi fiskal dilihat dalam pengukuran indikator penerimaan (RI) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut telah ditunjukkan pada nilai koefisien dari hasil estimasi bernilai negatif untuk indikator penerimaan. Rasio dari indikator penerimaan mencerminkan wewenang dari setiap pemerintah

daerah dalam penerimaan. Sehingga jika nilai rasio indikator penerimaan tinggi maka setiap daerah memiliki wewenang yang tinggi untuk mengelola dana yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ke tiap pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa ketika rasio dari indikator penerimaan tinggi maka pertumbuhan ekonomi daerah cenderung akan turun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuskhov (2015) yang menunjukkan bahwa desentralisasi dari sisi penerimaan, sisi pengeluaran, dan sisi otonomi memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Rusia. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah daerah di Rusia tidak memiliki insentif untuk membelanjakan anggaran secara lebih efisien. Hasil serupa pada penelitian di Indonesia seperti penelitian Simanjuntak (2010) dan Wibowo (2008) dalam Saputra (2013) membuktikan bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Situngkir et al (2014) membuktikan lebih spesifik lagi bahwa Desentralisasi fiskal dilihat dari indikator penerimaan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 4.7 memberikan gambaran bahwa daerah-daerah di Papua mempunyai dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang begitu besar dengan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Ketika hasil estimasi mengatakan bahwa ketika nilai rasio indikator penerimaan tinggi maka kewenangan di setiap daerah mengelola dana tinggi juga. Hal ini memberikan bukti setidaknya dengan kewenangan yang tinggi dikarenakan daerah-daerah di Papua ini mendapatkan dana yang berlimpah tiap tahunnya. Sumber penerimaan tersebut ialah dana perimbangan dan dana otonomi khusus.

Gambar 4.7: Realisasi Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota Provinsi Papua (dalam jutaan rupiah)



Sumber: Data diolah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

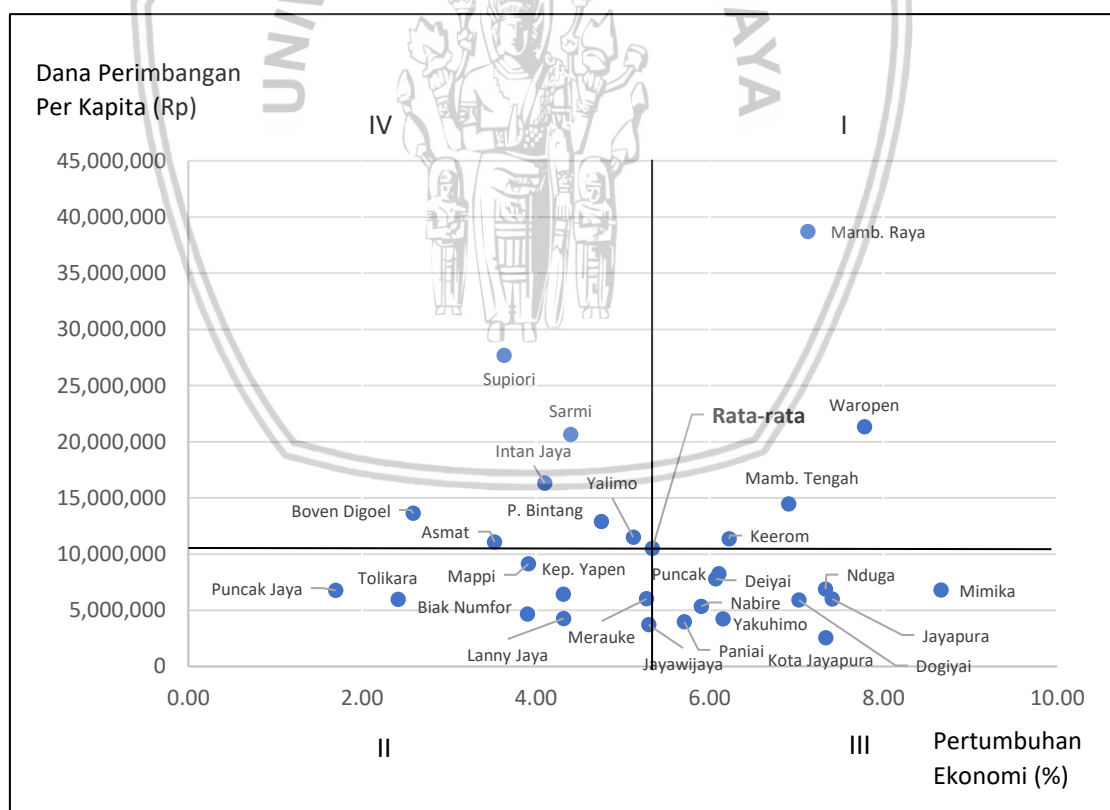
Dana perimbangan memiliki tren yang naik begitu pula dengan dana otonomi khusus memiliki trend naik juga dan cenderung stabil di tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Gubernur Papua yang dinamai Enembeconomics. Kebijakan tersebut berbicara mengenai mendesentralisasikan porsi dana otonomi khusus lebih besar ke Kabupaten/Kota sebesar 80% sedangkan sisanya sebesar 20% untuk Pemerintah Provinsi Papua. Kebijakan ini didasari dengan adanya tujuan untuk mempercepat pembangunan di Papua khususnya di bagian-bagian daerah disana. Sebelum kebijakan ini disahkan porsi alokasi dana otonomi khusus melalui perbandingan 60% dan 40% dengan masing-masing untuk Kabupaten/Kota yang paling tinggi porsinya dan sisanya bagi Pemerintah Provinsi Papua. Sama halnya dengan dana perimbangan, dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) diberikan di Papua tentu dengan porsi yang besar pula, mengingat situasi

dan kondisi perekonomian di berbagai daerah Papua menjadi pertimbangan untuk diberikan dana yang berlimpah. Kecenderungan di berbagai daerah di Papua mendapatkan dana yang besar yang berasal dari dana transfer, hal itulah menjadi pertanyaan bagaimana cara mengelola penerimaan dengan efisien di daerah Papua yang kurang maju dengan segala aspek serba berkekurangan.

Perbedaan dari hasil hipotesis dan teori untuk indikator penerimaan dapat terjadi dikarenakan setiap daerah yang jika dilihat pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tiap daerah belum dapat mengelola dengan benar penerimaan daerah baik berasal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dengan jumlah yang begitu besar. Sehingga penerimaan daerah yang selalu naik setiap tahunnya yang berisikan dominan berasal dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus (Otsus) selayaknya menjadikan insentif bagi Papua untuk meluncurkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Faktanya dalam penelitian ini menggambarkan sebaliknya dengan penerimaan yang begitu besar belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, tak dapat dipungkiri kualitas sumber daya manusia di sebagian daerah Papua diindikasikan masih tergolong rendah. Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua diketahui penggunaan dana otonomi khusus di Papua belum optimal serta dalam penggunaan dana tersebut kurang disertai dengan perencanaan yang matang. Beberapa proyek yang didanai melalui dana otsus tidak terukur sehingga terkesan mubazir. Misalnya puskesmas yang dibangun lokasinya jauh dari pemukiman dan akses jalan sehingga masyarakat kesulitan menjangkaunya. sebab itulah manfaatnya belum tersentuh ke masyarakat secara langsung dan benar. Pemeriksaan tersebut dilakukan belum bersifat investigasi dan hanya dilakukan di beberapa kabupaten dan tingkat provinsi dengan pemeriksaan sampel terhadap penggunaan dana otsus yang dirasakan masyarakat.

Gambar 4.8 menjelaskan mengenai perbandingan antara dana perimbangan per kapita dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Pada gambar tersebut pertumbuhan ekonomi tercermin dalam pertumbuhan PDRB per kapita. Secara sekilas terlihat bahwa dana perimbangan per kapita di Papua cenderung tinggi yakni di dominasi pada angka diatas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan lebih tinggi lagi. Hal ini menjelaskan bahwa setiap penduduk di tiap daerah mendapatkan manfaat dari dana perimbangan yang sangat tinggi, hal itu telah merepresentasikan pendapatan daerah yang diperoleh di Papua yang tinggi juga tiap tahunnya.

Gambar 4.8: Rata-rata Perbandingan antara Dana Perimbangan Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016



Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

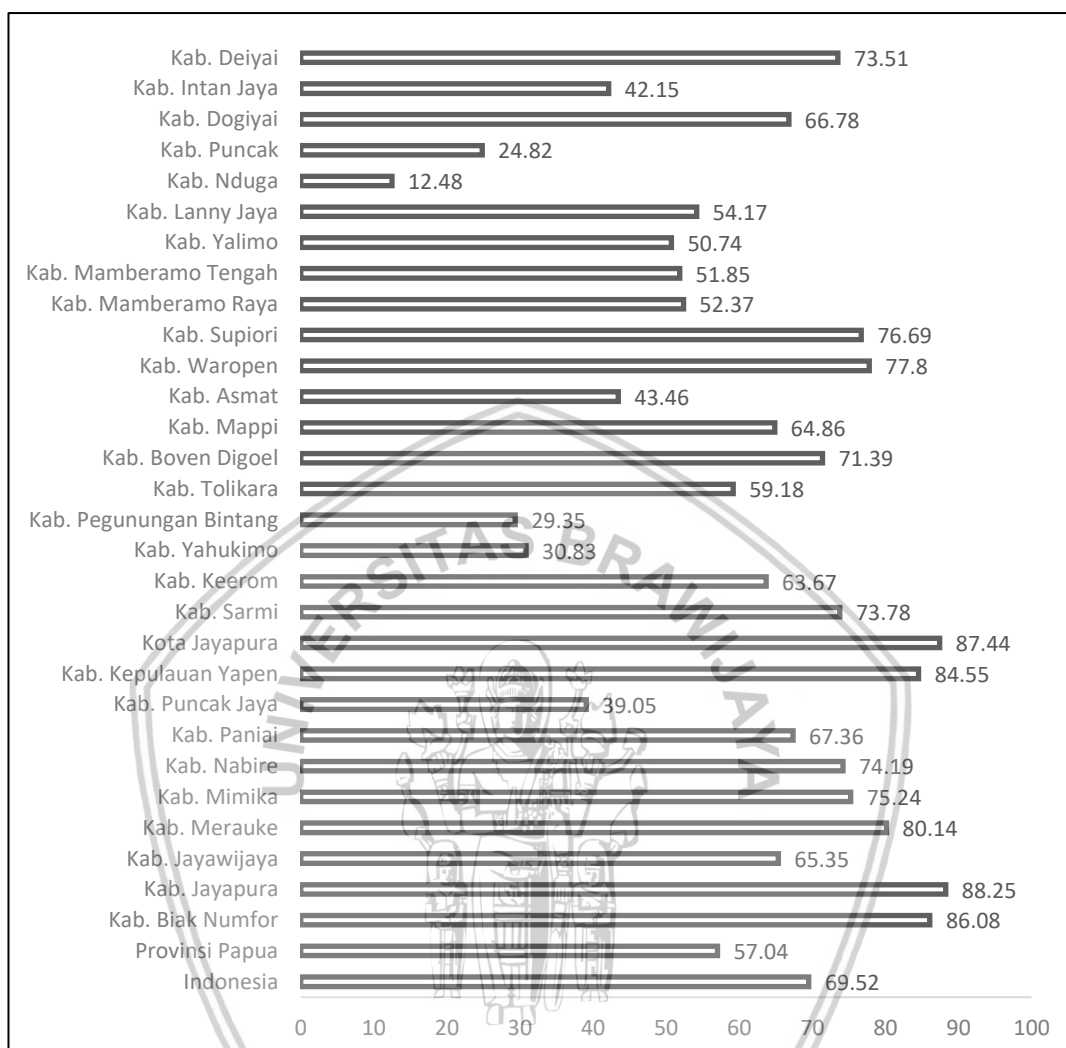
Dengan dana perimbangan per kapita yang tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi maka menghasilkan titik temu diantara keduanya. Kondisi pertumbuhan ekonomi di Papua relatif berbeda-beda, hal ini mencerminkan kondisi perekonomian yang ada di setiap daerah. Pada gambar tersebut telah terbagi empat kuadran untuk menjelaskan titik temu antar keduanya dan bagaimana hasilnya. Kuadran satu menjelaskan bahwa ketika dana perimbangan per kapita tinggi maka menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Setidaknya ada 4 daerah yang berada pada di titik kuadran satu, sehingga dengan penerimaan dana perimbangan per kapita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan keempat pemerintah daerah tersebut baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya diantaranya Kabupaten Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, dan Mamberamo Tengah. Lalu pada kuadran dua hanya terdapat 8 daerah, pada kuadran ini memberikan gambaran ketika dana perimbangan per kapita kecil maka merefleksikan pertumbuhan ekonomi yang kecil juga.

Pada kuadran tiga menjelaskan bahwa dengan dana perimbangan per kapita kecil maka menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Ada 10 daerah di titik pada kuadran tiga, sehingga meskipun dana perimbangan per kapita yang diperoleh kecil dapat berimbas pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat dikatakan pengelolaan keuangan daerah di kesepuluh daerah tersebut sangat efisien. Berbanding terbalik dengan kuadran empat yang mengindikasikan daerah-daerah pada titik tersebut kurang efektif dalam pengelolaan keuangan daerahnya dikarenakan dengan penerimaan dana perimbangan per kapita yang tinggi justru menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. pada kuadran empat terdapat kurang lebih 7 daerah yang menaunginya.

Analisis diatas diperkuat dengan adanya penelitian di daerah Papua pada era otonomi khusus seperti Hutajulu (2014) dan Hutajulu et all (2012) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Papua pada masa otonomi khusus kurang efektif, yang ditandai dengan pengelolaan pendapatan daerah disusun dengan kurang perencanaan dan tanpa data potensi pendapatan, sehingga menyebabkan pendapatan yang direncanakan cenderung di luar perkiraan yang berdampak lebih jauh pada alokasi penggunaan anggaran yang kurang sesuai dan terjadinya *idle-fund*.

Dengan banyaknya daerah yang kurang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah muncul pengindikasian yang lain penyebab masalah tersebut. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di setiap daerah yang kurang mampu mengelola dengan benar penerimaan daerah. Hal ini mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah Provinsi Papua. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan Pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam Pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas Pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Oleh karena itu dalam menggambarkan kualitas SDM di daerah-daerah Provinsi Papua dengan melihat dari angka partisipasi sekolah.

Gambar 4.9: Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2012-2015 (dalam persen)



Sumber: Data diolah BPS Provinsi Papua, 2018

Pada gambar 4.9 terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui angka partisipasi sekolah di 29 Kabupaten/Kota cenderung berbeda-beda. terdapat daerah yang memiliki nilai angka partisipasi sekolah dibawah 50% (lima puluh persen) diantaranya Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Puncak Jaya, dan Asmat. Sehingga dapat dikatakan 7 daerah tersebut kualitas sumber daya manusianya masih kurang bagus serta Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya Mamberamo Raya, dan Mamberamo Tengah tidak jauh berbeda juga dikarenakan memiliki nilai yang sedikit diatas 50% (lima puluh

persen). Oleh karena itu, dengan kualitas SDM yang rendah memicu adanya ketidakefektifan pengelolaan keuangan daerah di Papua.

Implikasi Indikator Penerimaan Pada Kabupaten/Kota

Tabel 4.13: Nilai Koefisien Pada Pengujian Pertama Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Daerah	Koefisien Daerah	Koefisien Konstanta	Koef. Daerah + Koef. Konstanta
Kab. Biak Numfor	13.25436	-16.22399	-2.96963
Kab. Jayapura	16.02566	-16.22399	-0.19833
Kab. Jayawijaya	3.547677	-16.22399	-12.676313
Kab. Merauke	13.56618	-16.22399	-2.65781
Kab. Mimika	19.04406	-16.22399	2.82007
Kab. Nabire	14.63208	-16.22399	-1.59191
Kab. Paniai	1.883631	-16.22399	-14.340359
Kab. Puncak Jaya	0.075784	-16.22399	-16.148206
Kab. Kepulauan Yapen	10.53294	-16.22399	-5.69105
Kota Jayapura	-1.364342	-16.22399	-17.588332
Kab. Sarmi	-4.994433	-16.22399	-21.218423
Kab. Keerom	-9.287346	-16.22399	-25.511336
Kab. Yahukimo	-10.76459	-16.22399	-26.98858
Kab. Pegunungan Bintang	-0.030880	-16.22399	-16.25487
Kab. Tolikara	-5.104523	-16.22399	-21.328513
Kab. Boven Digoel	9.263272	-16.22399	-6.960718
Kab. Mappi	-6.330669	-16.22399	-22.554659
Kab. Asmat	-6.599500	-16.22399	-22.82349
Kab. Waropen	-4.309644	-16.22399	-20.533634
Kab. Supiori	-9.414342	-16.22399	-25.638332
Kab. Mamberamo Raya	-6.542394	-16.22399	-22.686604
Kab. Mamberamo Tengah	-6.462614	-16.22399	-22.686604
Kab. Yalimo	-7.744703	-16.22399	-23.968693
Kab. Lanny Jaya	0.007354	-16.22399	-16.216636
Kab. Nduga	-4.677569	-16.22399	-20.901559
Kab. Puncak	-8.602266	-16.22399	-24.826256
Kab. Dogiyai	-2.379400	-16.22399	-18.60339
Kab. Intan Jaya	0.522272	-16.22399	-15.701718
Kab. Deiyai	-7.746056	-16.22399	-23.970046

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan hasil estimasi pada penelitian, Tabel 4.13 memaparkan bahwa nilai koefisien dari semua daerah berbeda-beda dengan nilai positif dan negatif. Kebanyakan daerah memiliki nilai negatif sebanyak 28 daerah dan hanya 1 daerah bernilai positif. Untuk menjelaskan implikasi setiap Kabupaten/Kota koefisien setiap daerah ditambah dengan koefisien konstanta pada hasil estimasi pengujian.

Pada nilai koefisien hasil estimasi menjelaskan bernilai negatif diantaranya Kabupaten Sarmi, Keerom, Yakuimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Mappi, Asmat, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Nduga, Puncak, Dogiyai, Deiyai, Biak Numfor, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, Boven Digoel, Lanny Jaya, Intan Jaya, dan Kota Jayapura. Salah satu contohnya pada Kabupaten Biak Numfor dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu persen) salah satunya dari rasio indikator penerimaan maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan sebesar hasil penjumlahan angka koefisien di daerah ditambah dengan nilai koefisien dari konstanta pada hasil estimasi pengujian yakni sebesar 2.96%. Berbeda dengan Kabupaten Mimika sendiri memiliki nilai koefisien positif. Asumsinya sama jika variabel independen lainnya bernilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu persen) salah satunya dari rasio indikator penerimaan maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami peningkatan sebesar angka koefisien ditambah dengan nilai koefisien dari konstanta pada hasil pengujian yaitu sebesar 2.82%. Dapat disimpulkan bahwa secara hasil estimasi di sebagian besar Kabupaten/Kota Provinsi Papua dengan rasio indikator penerimaan yang tinggi dengan mencerminkan kewenangan daerah dalam mengelola dana transfer yang tinggi pula menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin jatuh.

Salah satunya contohnya Kota Jayapura diyakini merupakan daerah yang paling maju serta menjadi pusat perekonomian di Papua. Namun hasil estimasi mengatakan bahwa dengan kewenangan yang tinggi yang dimiliki daerah tersebut tidak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutajulu (2014). Penelitian tersebut mengatakan dengan jelas bahwa Kota Jayapura dilihat dari segi efektifitas pengelolaan keuangan daerahnya masih kurang efektif dengan ditandainya pengelolaan keuangan yang kurang perencanaan dan masih banyak dana yang menganggur serta kurang sesuai alokasi penggunaan anggaran.

Contoh lainnya berada pada daerah-daerah yang memiliki koefisien bernilai negatif. Dipastikan semua daerah dengan kewenangan yang tinggi menghasilkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tampak sempurna jika dibandingkan dengan rata-rata angka partisipasi sekolah yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Dikarenakan semua daerah yang cenderung mengakibatkan pertumbuhan ekonomi lesuh ternyata memiliki angka partisipasi sekolah yang rendah atau dengan kata lain menggambarkan kualitas sumber daya manusia masih rendah. oleh sebab itulah. Dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada ketidakefektifan pengelolaan keuangan daerah di Papua dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak tercapai secara maksimal dan spontan malah terjadi penurunan.

Dapat dibandingkan daerah-daerah yang maju dan tidak, seperti Kabupaten Mimika sebagai daerah maju dan Kabupaten Nduga ialah daerah yang kurang maju dari segi ekonomi. Hasil estimasi sesuai menyatakan kondisi faktual dengan Kabupaten Mimika berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi sedangkan sebaliknya pertumbuhan ekonomi turun terjadi pada Kabupaten

Nduga. Dikarenakan memang Kabupaten Nduga ialah daerah yang paling miskin di Papua dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kecenderungan daerah-daerah yang berada dekat dengan laut seperti Kota Jayapura. Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika ialah daerah-daerah maju. Sedangkan daerah-daerah yang kurang maju tidak berada dekat dengan laut atau berada di tengah-tengah pulau dan terisolasi diantaranya Kabupaten Nduga, Puncak Jaya, Yakuimo, dan sebagainya. Hal itulah salah satu contoh bahwa masih tingginya ketimpangan di Provinsi Papua dengan Provinsi lainnya di Indonesia bahkan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua dengan bukti analisis dan fakta.

Indikator Pengeluaran

Hasil serupa ditunjukkan oleh variabel desentralisasi fiskal dilihat dalam pengukuran indikator pengeluaran (PI). Pada hasil estimasi memberikan hasil bahwa desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Hasil ini justru lebih buruk daripada hasil indikator sebelumnya yakni pada indikator penerimaan. Selain itu, hasil tersebut dengan jelas terlihat tidak sesuai hipotesis bahkan landasan teori dalam awal penelitian. Sama halnya dengan indikator penerimaan, rasio dari indikator pengeluaran mencerminkan wewenang dari setiap pemerintah daerah dalam pengeluaran. Sehingga jika nilai rasio indikator pengeluaran tinggi maka setiap daerah memiliki wewenang yang tinggi untuk membelanjakan dana yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ke tiap pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diukur dari indikator pengeluaran tidak mempengaruhi sama sekali baik naik bahkan turunnya kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustan (2013) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal

memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pendapatan dan pendapatan asli daerah, namun tidak berpengaruh dari sisi pengeluaran dikarenakan Belanja daerah dari Pemerintah daerah di 19 Provinsi Indonesia masih didominasi belanja pegawai dan belanja administratif dalam porsinya daripada belanja terkait pembangunan.

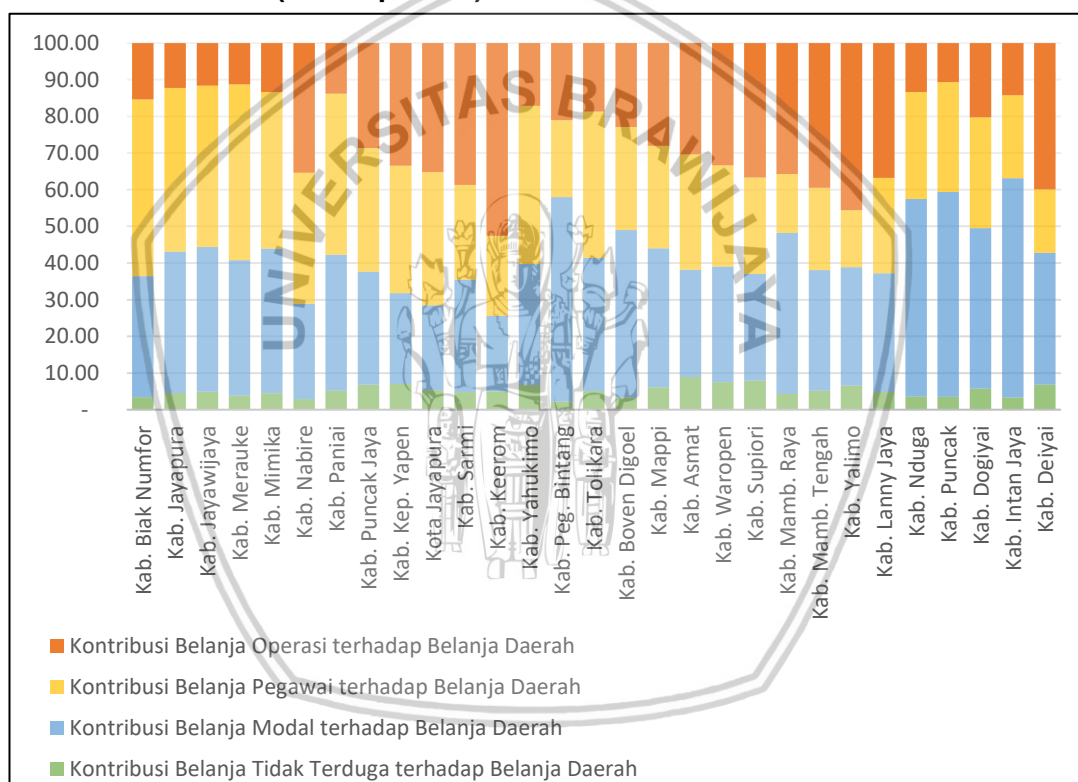
Seperti halnya dengan penelitian terdahulu menjelaskan bahwa sisi pengeluaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena belanja yang menjadi perangsang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat masih rendah. Jika dilihat dari kondisi di Papua sendiri menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi penyebab indikator pengeluaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah rendahnya atau kurangnya belanja terkait pembangunan juga?

Belanja daerah dalam strukturnya menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, sedangkan Belanja Modal terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Pada gambar 4.10 belanja operasi menggambarkan belanja operasi tanpa belanja pegawai, karena belanja pegawai dipisah tersendiri untuk menjelaskan secara detil fenomena dalam penelitian ini.

Berbagai sumber menyatakan belanja modal disebut sebagai belanja pembangunan karena merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran serta manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat seperti digunakan untuk belanja Pendidikan, kesehatan, bahkan infrastruktur. Pada gambar 4.10 terlihat bahwa sebagian daerah di Papua didominasi oleh belanja modal dibandingkan belanja pegawai,

dan sebagian lainnya didominasi belanja pegawai dibandingkan belanja modal. Hal ini mengindikasikan dalam hasil estimasi bahwa penyebab tidak berpengaruhnya indikator pengeluaran ialah adanya sebagian daerah di Papua yang nominal belanja modalnya cenderung rendah dibandingkan belanja pegawai, sehingga dapat dikatakan pembangunan di sebagian daerah Papua masih rendah.

Gambar 4.10: Rata-rata Perbandingan Kontribusi Belanja Operasi, Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016 (dalam persen)



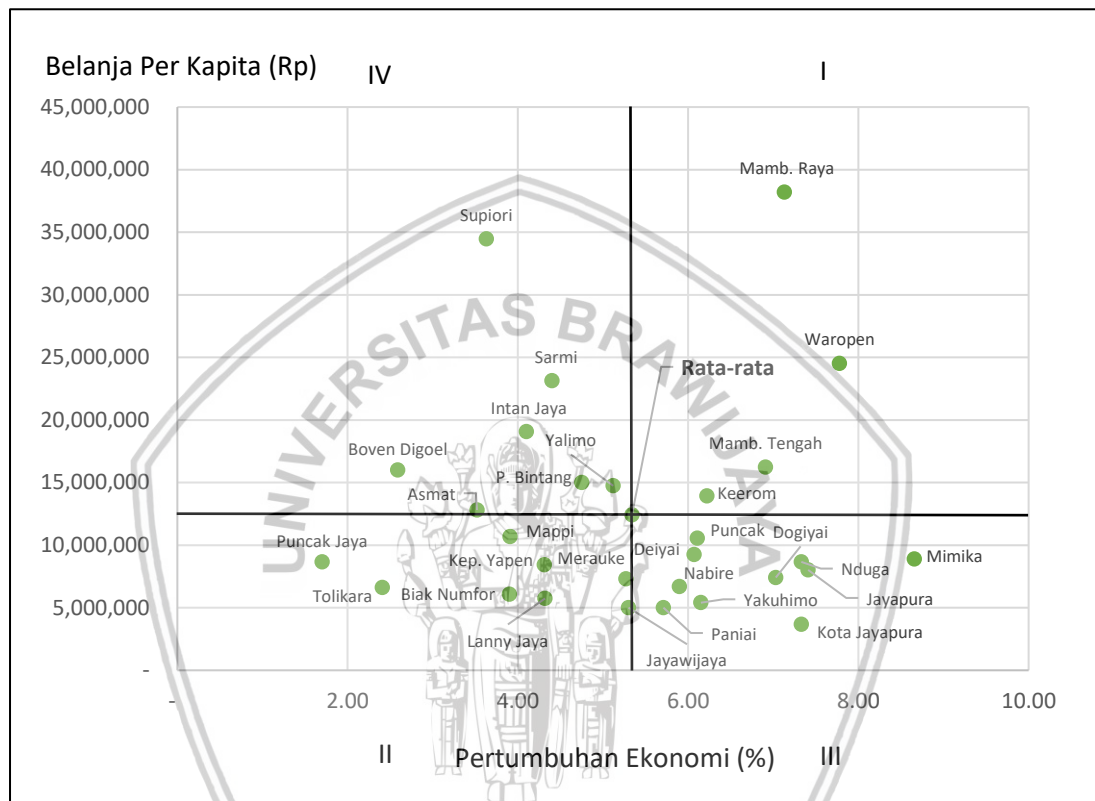
*) Belanja Operasi = Belanja Operasi tanpa Belanja Pegawai

Sumber: Data diolah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Salah satu fakta terjadinya belanja pegawai yang besar sebagian daerah di Papua ialah masyarakat Papua banyak yang lebih memilih menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dibandingkan pekerjaan yang lain seperti wirausaha. Hal ini didasari dikarenakan sektor ekonomi telah dikuasai oleh Non-Papua sehingga

pandangan masyarakat lebih enak memilih menjadi sebagai PNS karena terjamin hidupnya bahkan pendapatannya.

Gambar 4.11: Rata-rata Perbandingan antara Belanja Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016



Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Gambar 4.11 menjelaskan mengenai perbandingan antara belanja per kapita dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Pada gambar tersebut pertumbuhan ekonomi tercermin dalam pertumbuhan PDRB per kapita. Secara seksama terlihat bahwa belanja per kapita di Papua tidak jauh berbeda dari dana perimbangan per kapita yaitu cenderung tinggi karena tentu saja menyesuaikan penerimaan yang didapatkan daerah tersebut. Terdapat empat pembagian dalam menjelaskan titik-titik sebagai titik temu antar belanja per kapita dengan pertumbuhan ekonomi yakni kuadran. Kuadran satu menjelaskan

bahwa ketika belanja per kapita tinggi maka diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Terdapat 4 daerah yang berada pada kuadran satu, sehingga pengeluaran yang dibelanjakan oleh daerah-daerah tersebut sudah tepat sasaran dengan bukti nominal yang dibelanjakan tinggi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga. Selanjutnya pada kuadran dua, terdapat 8 daerah sama di kuadran tersebut sehingga setiap daerah membelanjakan dana begitu kecil yang berimbas pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya terdapat 10 daerah yang berada pada kuadran tiga. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang berada pada kuadran tiga disebut efisien dalam menggunakan dana untuk belanja, karena dengan belanja per kapita yang relatif kecil dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu contohnya ialah Kota Jayapura dimana merupakan daerah yang menjadi pusat perekonomian di tanah Papua dengan jumlah penduduk yang besar, tidak heran dengan melihat data bahwa sebenarnya pendapatan daerah yang diterima tinggi namun karena jumlah penduduk yang tinggi juga menghasilkan pendapatan bahkan belanja per kapita di Kota Jayapura kecil. Akan tetapi meskipun begitu pencapaian pertumbuhan ekonomi masih terlampaui tinggi. Efisiensi penggunaan dana dalam belanja bagi Kota Jayapura memang tidak diragukan lagi karena daerah ini yang paling maju serta daerah yang mampu menggunakan dana sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Pada kuadran empat terdapat 8 daerah yang diindikasikan kurang efektif dalam menggunakan dana dalam belanja, hal ini tercermin pada belanja per kapita tinggi namun pertumbuhan ekonomi cenderung rendah. sehingga dapat dikatakan 8 daerah tersebut belum mampu menggunakan dana secara tepat dalam memenuhi keperluannya. Oleh karena itu, hasil estimasi tercermin bahwa indikator pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien negatif.

Berkaitan dengan hasil estimasi diatas, sebuah penerimaan pasti diikuti oleh pengeluaran. Seberapa besar penerimaan akan mencerminkan seberapa besar pengeluaran yang akan terjadi, bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Indikator pengeluaran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada paparan hasil penelitian ini dengan memberikan indikasi yang lainnya. Melihat kondisi di Papua secara nyata memberikan informasi bahwa banyak tindak korupsi pada APBD di beberapa kabupaten/kota dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2016. Kebanyakan yang terjangkit permasalahan ini ialah kepala daerah dan pejabat di tiap daerah menurut hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013. Hal tersebut disebabkan terjadinya penganggaran ganda terhadap suatu proyek atau kegiatan, selain itu nilai proyek juga digelembungkan atau di *mark up*, serta penggunaanya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daerah-daerah yang menghadapi proses hukum antara lain Kabupaten Waropen, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura. Selain itu, Kepala daerah Kabupaten Biak Numfor menyalahgunakan kewenangannya dengan cara memindahbukukan kas daerah ke rekening pribadi sejak tahun 2011-2013. Dan akhir-akhir ini di tahun 2017 adanya dugaan korupsi APBD tahun anggaran 2013-2016 oleh Kepala Daerah dengan permasalahan penyaluran dana beasiswa hingga dana pelaksanaan proyek-proyek.

Dari pemaparan diatas diindikasikan bahwa dalam penelitian ini variabel desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dikarenakan banyak tindak korupsi dan kemungkinan lainnya. Masalahnya dana yang seharusnya dibelanjakan untuk pembangunan daerah di kabupaten/kota justru digunakan untuk sesuatu yang lain dalam memenuhi hasrat tersangka tindak korupsi.

Sehingga kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah di Papua menjadi terhambat.

Menurut Prud'home (1995) menjelaskan bahwa beberapa persoalan yang menjadi penyebab kegagalan desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain; (i) Pemerintah daerah tidak dapat memenuhi preferensi masyarakat lokal, baik karena tidak adanya keinginan politik, maupun disebabkan oleh aparatur yang kurang termotivasi dan atau memenuhi syarat untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, (ii) Meningkatkannya korupsi di tingkat lokal karena umumnya politisi dan birokrat lokal lebih rentan karena mudah diakses oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan. Karena itu jika Pemerintah daerah mampu menghilangkan ataupun mengurangi korupsi di tingkat lokal, maka desentralisasi akan menciptakan efisiensi alokasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, (iii) Adanya sistem politik yang tidak demokratis, sehingga premis dasar bahwa pemerintah daerah memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyediakan barang publik lokal secara lebih efisien mungkin tidak berlaku.

Selain itu, Davoodi dan Zou (1998) menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan desentralisasi fiskal dalam beberapa hal menjadi kurang menguntungkan bagi pembangunan antara lain komposisi pengeluaran pemerintah, penetapan pendapatan yang kurang tepat oleh pemerintah daerah, keuntungan efisiensi desentralisasi fiskal yang kurang materiil di negara-negara berkembang dan ketidakcakapan aparatur daerah.

Implikasi Indikator Pengeluaran Pada Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil estimasi pada penelitian. Tabel 4.14 menjelaskan bahwa nilai koefisien dari semua daerah memiliki nilai yang sama yakni negatif.

Nilai koefisien didapat melalui nilai koefisien masing-masing daerah ditambah dengan nilai koefisien konstanta pada estimasi pengujian.

Tabel 4.14: Nilai Koefisien Pada Pengujian Kedua Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Daerah	Koefisien Daerah	Koefisien Konstanta	Koef. Daerah + Koef. Konstanta
Kab. Biak Numfor	11.34501	-15.51961	-4.1746
Kab. Jayapura	13.77346	-15.51961	-1.74615
Kab. Jayawijaya	2.461770	-15.51961	-13.05784
Kab. Merauke	8.910243	-15.51961	-6.609367
Kab. Mimika	12.59462	-15.51961	-2.92499
Kab. Nabire	12.22024	-15.51961	-3.29937
Kab. Paniai	1.795830	-15.51961	-13.72378
Kab. Puncak Jaya	-0.392359	-15.51961	-15.911969
Kab. Kepulauan Yapen	9.287074	-15.51961	-6.232536
Kota Jayapura	-1.272394	-15.51961	-16.792004
Kab. Sarmi	-4.295003	-15.51961	-19.814613
Kab. Keerom	-7.310238	-15.51961	-22.829848
Kab. Yahukimo	-9.043682	-15.51961	-24.563292
Kab. Pegunungan Bintang	-0.744406	-15.51961	-16.264016
Kab. Tolikara	-5.374325	-15.51961	-20.893935
Kab. Boven Digoel	7.384581	-15.51961	-8.135029
Kab. Mappi	-5.805567	-15.51961	-21.325177
Kab. Asmat	-6.339965	-15.51961	-21.859575
Kab. Waropen	-2.715121	-15.51961	-18.234731
Kab. Supiori	-7.021417	-15.51961	-22.541027
Kab. Mamberamo Raya	-5.518120	-15.51961	-21.03773
Kab. Mamberamo Tengah	-4.783281	-15.51961	-20.302891
Kab. Yalimo	-5.633673	-15.51961	-21.153283
Kab. Lanny Jaya	0.884134	-15.51961	-14.635476
Kab. Nduga	-2.828642	-15.51961	-18.348252
Kab. Puncak	-7.275635	-15.51961	-22.795245
Kab. Dogiyai	-0.924289	-15.51961	-16.443899
Kab. Intan Jaya	1.607654	-15.51961	-13.911956
Kab. Deiyai	-4.986509	-15.51961	-20.508119

Sumber: Hasil Eviews 10

Salah satu contohnya Kabupaten Deiyai dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0). sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu

persen) salah satunya dari rasio indikator pengeluaran maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan sebesar angka koefisien sebesar 20.50%. Dapat disimpulkan bahwa secara hasil estimasi di sebagian besar Kabupaten/Kota Provinsi Papua dengan rasio indikator pengeluaran yang tinggi dengan mencerminkan kewenangan daerah dalam membelanjakan dana yang tinggi pula menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin lama semakin terperosok dengan indikasi tidak tepat sasaran penggunaan dana dalam belanja daerah serta tidak sesuai dalam penggunaan atau disalahgunakan.

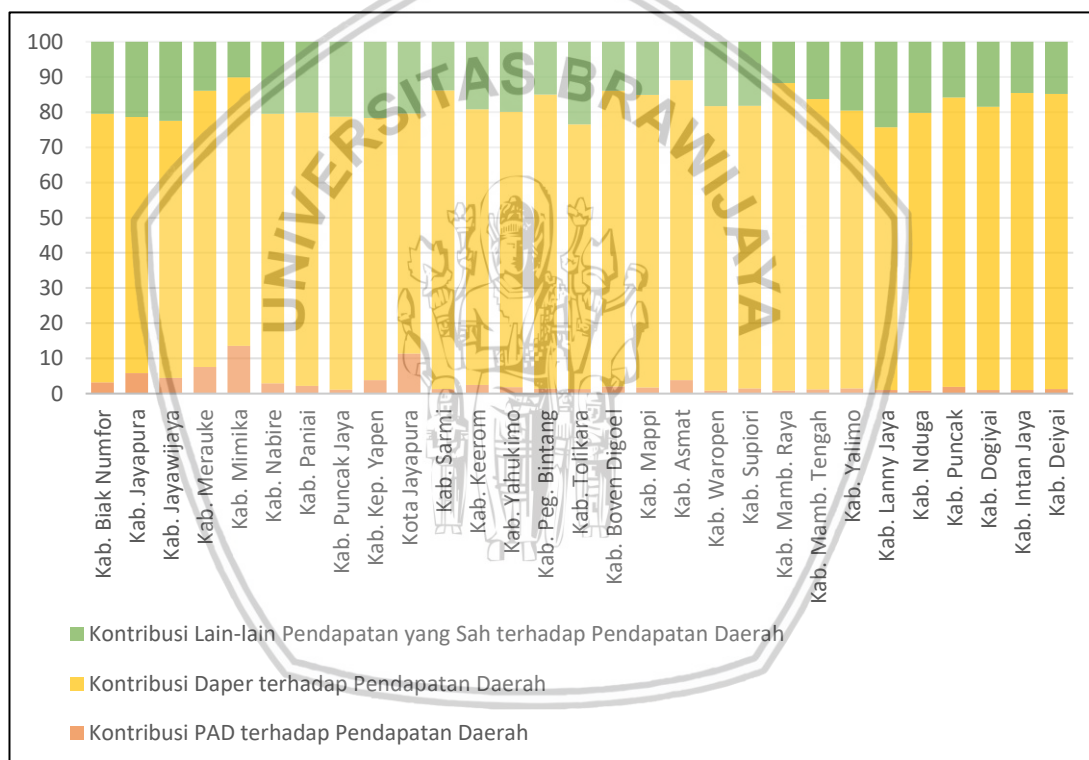
Indikator Otonomi

Pembahasan terakhir akan dijelaskan mengenai variabel desentralisasi fiskal dari pengukuran indikator otonomi (AI). Indikator otonomi mencerminkan kemandirian fiskal karena kemandirian fiskal merupakan pengukuran yang digunakan untuk melihat seberapa mandiri suatu daerah untuk dapat mengelola keuangannya sendiri dengan melihat potensi yang dimiliki dari daerah tersebut. Di Provinsi Papua tidak diragukan lagi memiliki kekayaan alam yang melimpah, selayaknya hal itu menjadikan pendapatan asli daerah di wilayah Papua cenderung tinggi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah di setiap Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini justru memberikan hasil yang berbeda daripada penelitian sebelum-sebelumnya yang menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator otonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diukur dari indikator otonomi tidak mempengaruhi sama sekali baik naik bahkan turunnya kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini seperti Situngkir et al (2014) memaparkan bahwa indikator otonomi

yang merupakan rasio total PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan hubungan negatif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang serupa lainnya ialah Suwandika et all (2015) yang memberikan hasil bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 4.12: Rata-rata Perbandingan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016 (dalam persen)



Sumber: Data diolah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018

Gambar 4.12 memberikan informasi bahwa perbandingan antara Dana transfer yang diantaranya dana perimbangan dan dana otonomi khusus lebih mendominasi penerimaan daerah yang ada di 29 Kabupaten/Kota Provinsi Papua dibandingkan pendapatan asli daerahnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Papua

masih bergantung pada transfer dana dari Pemerintah Pusat dan belum tergolong daerah yang mandiri sebagai daerah otonom.

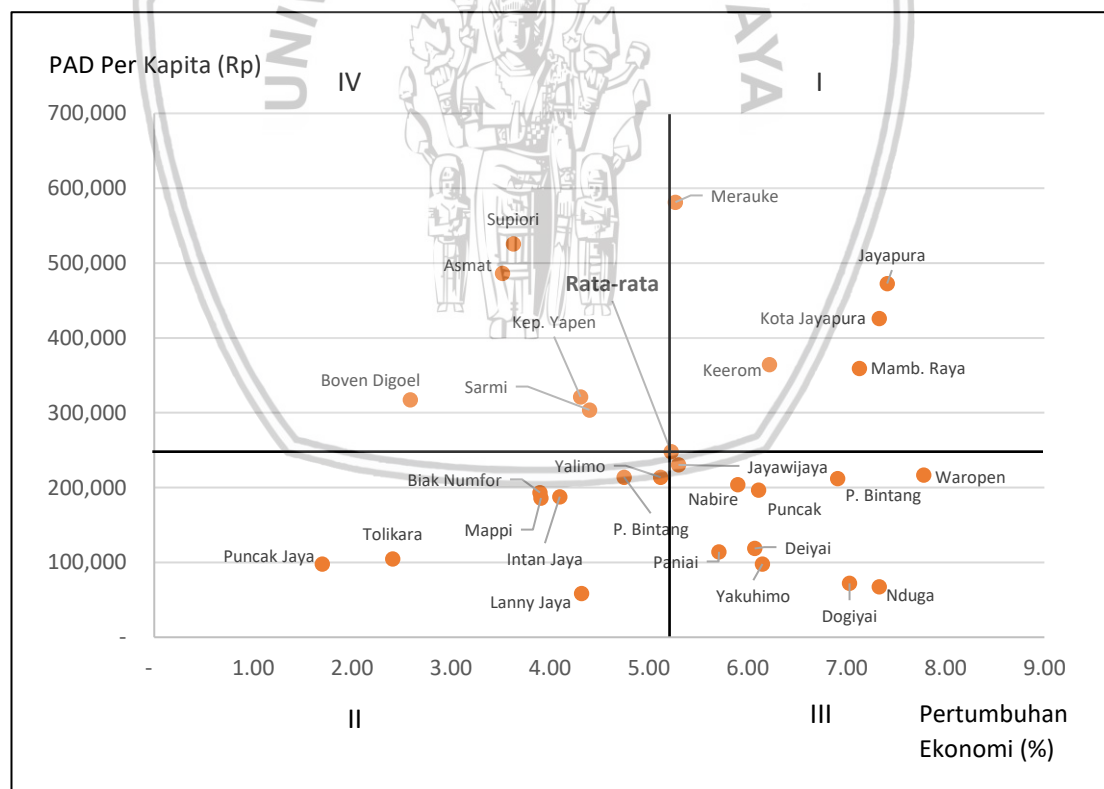
Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terlihat sangat kecil sekali jika dibandingkan terhadap dana transfer ke total pendapatan daerah di masing-masing daerah. Tidak lebih dari 5% (lima persen) kontribusi yang disumbangkan oleh semua daerah di Papua kecuali dua daerah yaitu Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura yang masing-masing memiliki kontribusi sedikit lebih tinggi sebesar 13,6% dan 11,4% terhadap total pendapatan daerah di daerah tersebut.

Sumbangsih PAD yang diperoleh Kabupaten Mimika semata-mata merupakan karena adanya salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia yaitu PT. Freeport Indonesia dengan kontribusi perusahaan tersebut mencapai 85%. Orang-orang Mimika mengatakan bahwa Freeport dan Mimika adalah ibarat sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Mencoba memisahkannya berarti akan muncul ketimpangan kedepannya. Berbeda cerita bagi Kota Jayapura yang merupakan pusat perekonomian di tanah Papua, sebagai penyuplai seluruh bahan makanan, bangunan dan kebutuhan lainnya di tanah Papua, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Jayapura seperti Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi dan juga Kawasan pegunungan sekitarnya. Kota ini tidak sama seperti Kabupaten Mimika yang memiliki hasil emas tambang, justru hanya mengandalkan sektor jasa dan perdagangan sehingga PAD Kota Jayapura banyak disumbang oleh kedua sektor tersebut sebagai penopang.

Komponen pendapatan asli daerah (PAD) di setiap kabupaten/Kota cenderung memiliki nominal yang kecil dan diperparah lagi angka yang dihasilkan diantaranya fluktuatif dan mengalami penurunan yang besar. Dilihat dari segi penerimaan pajak daerah, memberikan fakta bahwa terdapat daerah yang

memang tidak mempunyai atau menghasilkan pajak daerah di APBD diantaranya Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, permasalahan lainnya terdapat daerah yang baru menghasilkan pajak di tahun 2012 yakni Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Supiori. Diikuti Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo tahun 2014 baru menghasilkan pajak serta di tahun 2015 ialah Kabupaten Nduga. Jika diteropong dari segi retribusi daerah pun tidak jauh berbeda yaitu memiliki kontribusi yang kecil terhadap PAD serta banyak daerah yang tidak menghasilkan dan baru menghasilkan retribusi pada tahun tertentu.

Grafik 4.13: Rata-rata Perbandingan antara PAD Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2016



*) Kabupaten Mimika tidak dicantumkan

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Grafik 4.13 menggambarkan pendapatan asli daerah per kapita dengan dihubungkan ke pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pertumbuhan PDRB per kapita. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh setiap daerah kecil memberikan dampak kecilnya juga PAD per kapita di Papua. Akan tetapi pada gambar tampak bahwa beberapa daerah dengan kecilnya PAD menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Pada kuadran satu menjelaskan bahwa terdapat 5 daerah diantaranya Kabupaten Keerom, Merauke, Jayapura, Mamberamo Raya, dan Kota Jayapura yang mana memperoleh PAD per kapita tinggi dengan diikuti pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bertolak belakang dengan kuadran dua yang menjelaskan PAD per kapita rendah berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang rendah pula, di kuadran ini terdapat 8 daerah diantaranya Kabupaten Mappi, Biak Numfor, Intan Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Yalimo, dan Pegunungan Bintang.

Kuadran tiga terdapat setidaknya 12 daerah dengan PAD per kapita rendah dengan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini disebut efisien karena dapat mengelola pendapatan asli daerah meskipun kecil dengan berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan pada kuadran empat dikatakan dengan tingginya PAD yang dihasilkan namun menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. hal ini mengindikasikan bahwa pada kuadran empat disebutkan kurang efektif dalam mengelola pendapatan asli daerah dengan diantaranya ada 5 daerah. Selain itu, Kabupaten Mimika tidak dicantumkan karena angka PAD per kapita terlampaui tinggi dibandingkan daerah-daerah lain dan menjadikan gambar sulit dianalisis.

Sejujurnya dengan perolehan PAD per kapita yang kecil mustahil sekali untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terpampang jelas pada gambar bahwa PAD per kapita setiap daerah cenderung kecil dengan nominal

tidak sampai 1 juta. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak lain berasal dari perolehan dana transfer dan bukan dari penerimaan pendapatan asli daerah. Telah simpulkan diatas dikarenakan kontribusi pendapatan daerah terbesar terdapat pada dana transfer yakni dana perimbangan di semua daerah Papua.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua masih sangat tergantung terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari dana transfer karena masih rendahnya pendapatan yang bersumber dari PAD. Kuncoro (2004) dalam Zulyanto (2010) menjelaskan penyebab ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat, antara lain: (i) Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah, (ii) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (iii) kendatipun pajak daerah cukup beragam, hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan, dan (iv) Adanya kekhawatiran akan terjadi disintegrasi dan separatism bila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi.

Kemungkinan besar lainnya sektor-sektor perekonomian di Papua belum dimaksimalkan dengan baik dan tidak fokuskan pada sektor yang berpotensi memiliki efek pengganda oleh karena itu pendapatan asli daerah (PAD) tidak memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari gambaran rasio indikator otonomi yang mencerminkan PAD terhadap pendapatan daerah setiap daerah dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota di Papua masih bergantung besar pada dana transfer baik dari Pemerintah pusat bahkan sekalipun Provinsi. Oleh sebab itu, dikategorikan Papua ini merupakan daerah yang belum mencapai kemandirian fiskal sebagai daerah otonom yang sah.

Implikasi Indikator Otonomi Pada Kabupaten/Kota

Tabel 4.15: Nilai Koefisien Pada Pengujian Ketiga Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Daerah	Koefisien Daerah	Koefisien Konstanta	Koef. Daerah + Koef. Konstanta
Kab. Biak Numfor	12.29330	-19.83654	-7.54324
Kab. Jayapura	14.42710	-19.83654	-5.40944
Kab. Jayawijaya	2.390556	-19.83654	-17.445974
Kab. Merauke	7.322225	-19.83654	-12.514315
Kab. Mimika	11.41727	-19.83654	-8.41927
Kab. Nabire	13.10425	-19.83654	-6.73229
Kab. Paniai	2.206245	-19.83654	-17.630295
Kab. Puncak Jaya	-0.752009	-19.83654	-20.588549
Kab. Kepulauan Yapen	10.48664	-19.83654	-9.3499
Kota Jayapura	-0.763079	-19.83654	-20.599619
Kab. Sarmi	-4.313830	-19.83654	-24.15037
Kab. Keerom	-7.002228	-19.83654	-26.838768
Kab. Yahukimo	-9.740854	-19.83654	-29.577394
Kab. Pegunungan Bintang	-1.469796	-19.83654	-21.306336
Kab. Tolikara	-5.329880	-19.83654	-25.16642
Kab. Boven Digoel	7.307984	-19.83654	-12.528626
Kab. Mappi	-6.339535	-19.83654	-26.176075
Kab. Asmat	-7.281241	-19.83654	-27.117781
Kab. Waropen	-2.193829	-19.83654	-22.030369
Kab. Supiori	-6.200771	-19.83654	-26.037311
Kab. Mamberamo Raya	-5.558740	-19.83654	-25.39528
Kab. Mamberamo Tengah	-4.368344	-19.83654	-24.204884
Kab. Yalimo	-5.816684	-19.83654	-25.653224
Kab. Lanny Jaya	0.392321	-19.83654	-19.444219
Kab. Nduga	-2.797727	-19.83654	-22.634267
Kab. Puncak	-8.211998	-19.83654	-28.048538
Kab. Dogiyai	-0.231704	-19.83654	-20.068244
Kab. Intan Jaya	1.426309	-19.83654	-18.410231
Kab. Deiyai	-4.401877	-19.83654	-24.238417

Sumber: Hasil Eviews 10

Berdasarkan hasil estimasi pada penelitian. Tabel 4.15 menjelaskan bahwa nilai koefisien dari semua daerah memiliki nilai yang sama dengan indikator sebelumnya yaitu indikator pengeluaran dengan nilai koefisien negatif. Nilai

koefisien didapat melalui nilai koefisien masing-masing daerah ditambah dengan nilai koefisien konstanta pada estimasi pengujian.

Salah satu contohnya Kabupaten Jayapura dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai nol (0). sehingga setiap terjadi kenaikan 1% (satu persen) salah satunya dari rasio indikator otonomi maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami penurunan sebesar angka koefisien sebesar -5.40944%. Dapat disimpulkan bahwa secara hasil estimasi di sebagian besar Kabupaten/Kota Provinsi Papua dengan rasio indikator otonomi yang tinggi dengan mencerminkan kemandirian fiskal berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di semua daerah. Akan tetapi meskipun baik tinggi maupun rendahnya kemandirian fiskal tetap tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan secara data telah ditampilkan, dalam menggambarkan kemandirian fiskal setidaknya pendapatan asli daerah harus lebih tinggi dari pada dana perimbangan. Namun berkebalikan fakta yang terjadi pada semua daerah di Papua sehingga menjadikan berdampak negatif yang tercermin dalam koefisien yang bernilai negatif semua.

4.5.2 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan pada laju pertumbuhan penduduk maka pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB per kapita akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dapat dicerminkan melalui angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua masih terbilang sangat rendah. Meskipun

seperti itu, hasil penelitian yang menunjukkan arah yang berhubungan negatif ini juga ditemukan pada hasil penelitian Rustan (2013) dan Yuskhov (2015). Hasil ini mendukung pula pendapat Mankiw (2003) yang menjelaskan bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka semakin kecil jumlah modal per pekerja dan berdampak pada rendahnya output per pekerja. Selain itu dapat dijelaskan pula bahwa dengan semakin tinggi jumlah penduduk, maka total output yang dihasilkan akan terbagi kepada lebih banyak penduduk, sehingga menyebabkan semakin sedikitnya output yang akan diterima oleh masing-masing penduduk.

Investasi Daerah

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa variabel investasi daerah yang tercermin dalam rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan pada rasio PMTB terhadap PDRB maka pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB per kapita akan mengalami kenaikan pula. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak berbeda dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998) serta Zulyanto (2010).

4.6 Implikasi Penelitian

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukannya desentralisasi fiskal yakni mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah. Selain itu, diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya serta tata kelola pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan

pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil.

Dalam penelitian ini memaparkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Provinsi Papua sebagai daerah otonomi tentu telah menerima transfer dari pemerintah pusat sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Papua dapat mendekatkan Pemerintah dengan masyarakat secara langsung dengan begitu pemerintah daerah lebih memiliki informasi yang lengkap mengenai potensi bahkan kondisi mengenai daerah yang dinaungi masing-masing. Lalu pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang dan jasa publik dibanding penyediaan yang tersebut oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah akan lebih efisien dalam melakukan pengeluaran atau belanja dibandingkan pemerintah pusat yang melakukannya. Dengan tercapainya efisiensi dalam pelayanan publik berangsur-angsur lama kelamaan akan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang positif baik di Provinsi Papua maupun di daerah-daerah lainnya.

Era desentralisasi fiskal menunjang setiap daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri dengan diberikan dana transfer serta menghasilkan penerimaan asli daerahnya sendiri. Desentralisasi fiskal menuntut tiap-tiap daerah memiliki kemandirian fiskal yang tinggi dengan mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal dikatakan menawarkan sejumlah manfaat baik tata kelola sektor publik, termasuk pertumbuhan, akuntabilitas, dan responsivitas para pejabat pemerintah terhadap tuntutan lokal dan kebutuhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan serta memberikan solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator penerimaan, indikator pengeluaran, dan indikator otonomi serta variabel kontrol diantaranya pertumbuhan penduduk dan investasi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.
2. Desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator penerimaan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Hasil tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan daerah di berbagai daerah Papua kurang efektif serta penyebab ketidakefektifan itu dapat disebabkan karena kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah.
3. Desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Hal ini disebabkan besarnya porsi belanja

pegawai daripada belanja modal di sebagian daerah Papua serta diindikasikan karena penyalahgunaan dana APBD.

4. Desentralisasi fiskal yang diukur melalui indikator otonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Hasil ini terbukti karena belum mandirinya semua daerah di Papua yang tampak tercermin kontribusi dana transfer yakni dana perimbangan sangat mendominasi daripada pendapatan asli daerah (PAD) sehingga kemandirian fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua belum tercapai dan masih bergantung pada Pemerintah Pusat.
5. Variabel kontrol yang terdiri dari pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan investasi daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka saran yang tepat untuk direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan lebih mengevaluasi dan meningkatkan lagi dalam pengelolaan keuangan, terutama pada sumber daya manusia serta sarana dan prasarana teknologinya.
2. Pemerintah daerah perlu memperbesar porsi belanja modal dibandingkan belanja pegawai. dengan perkembangan alokasi belanja modal yang semakin baik pada belanja daerah maka akan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Selain itu, selayaknya penggunaan dana dalam belanja daerah haruslah tepat sasaran dan jangan sampai di salahgunakan.

3. Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan penerimaan yang berasal dari transfer pusat. Cara yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan dengan baik dan memfokuskan sektor-sektor perekonomian di Papua yang berpotensi memiliki efek pengganda sehingga pendapatan asli daerah (PAD) memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk penguatan *local taxing power* melalui revisi UU pajak dan retribusi daerah harus mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber lokal.
4. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya mencoba daerah-daerah lain di Indonesia dan menambah variabel lain untuk variabel kontrol agar menghasilkan estimasi yang jauh lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y.O dan Eltayeb, A.M. 2016. Forestry Decentralization and Poverty Alleviation. *Forest Policy and Economics*, Vol. 73, 300-307.
- Adisasmita, Raharjo. 2008. *Pembangunan wilayah: konsep dan teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akai, Nobuo dan Sakata, Masayo. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data For The United States. *Journal of Urban Economics* 52.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Bappenas. 2017. *Seri Analisis Pembangunan Daerah Provinsi Papua*. (<http://simreg.bappenas.go.id>). Diakses pada Januari 2018
- BPKAD Provinsi Papua. 2017. *Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. (bpkad.papua.go.id). diakses pada Desember 2017.
- BPS Provinsi Papua. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua, Profil Ketenagakerjaan, Indikator Pendidikan, Laporan Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua*. (<https://papua.bps.go.id>). Diakses pada Januari 2018
- Davoodi, Hamid dan Zou, Heng-fu. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross Country Study: *Journal of Urban Economics* 43, 244-257.
- DJPk Kementerian Keuangan. 2017. *Realisasi APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>). diakses pada Desember 2017
- Gujarati, D.N dan Porter, D.C. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Buku 2, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Muhammad N.S. 2016. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Timur (Studi Kasus 38 Kab/Kota di Jawa Timur)*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Hutajulu et all. 2012. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 5, No. 2.
- Hutajulu, Halomoan. 2014. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 1.
- Ismail et all. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*. Malang: PT. Gelora Aksara Pratama.

- Kalin, Walter. 2001. *Guide to Decentralization*. Swiss: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC.
- Kementerian Keuangan RI. 2017. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. (www.kemenkeu.go.id). diakses pada Desember 2017.
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Terapan* Vol. 9, no. 1.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mualim. 2011. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kelembagaan Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Nguyen, Lan Phi dan Anwar, Sajid. 2011. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Vietnam. *Journal of The Asia Pacific Economy*, Vol. 16, No. 1.
- Noor, Muhammad. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
- Prud'homme, R. 1995. The Dangers of Decentralization. *The World Bank Research Observer*, Vol. 10, No. 2.
- Rodriguez-Pose, Andres dan Kroijer, Anne. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. *Growth and Change*, Vol. 40, No.3
- Rustan. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi serta kaitannya Dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 9, No. 3.
- Sadono, Sukirno. 2006. *Ekonomi pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Saputra, Bambang. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 9, No. 1.
- Satria, Anton B. 2016. *Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2013*. Skripsi diterbitkan. Surabaya: Program Sarjana Universitas Airlangga.
- Situngkir et al. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*, Vol. 17, No. 3.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. 2000. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Suwandika et all. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP unud*, Vol. 4, No. 7.
- Thiessen, U. 2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth in High-Income OECD Countries. *Fiscal Studies*, 24(3), 237-274.
- Tsalits, Irham M. 2017. *Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)*. Skripsi diterbitkan. Bandar Lampung: Program Sarjana Universitas Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- UNDP. 2006. *Sintese Kapasitas Pembangunan Papua. Kerjasama Antar UNDP dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Multipihak di Papua*.
- Widianto, Andri. 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Kota Tegal*. Skripsi tidak diterbitkan.
- World Bank. 2005. *Papua Public Expenditure Analysis: Regional Finance and Service Delivery in Indonesia's Most Remote Region*. Jakarta/Makassar: World Bank, Provincial Govt. Papua, Support Office for Eastern Indonesia(Sofei)
- Yushkov, Andrey. 2015. Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirics, and The Russian Experience. *Russian Journal of Economics*, Volume 1, Issue 4, 404-418.
- Zhang, Tao dan Zou, Heng-fu. 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics* 67:221-240.
- Zulyanto, Aan. 2010. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Tesis diterbitkan. Semarang: Program Sarjana Universitas Diponegoro.